

**STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG
KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK SUAMI DENGAN KHI PASAL 164
TENTANG KEWENANGAN ISTRI UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:
PURWANTO
NIM 2102036**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs.H. Slamet Hambali.

Jl. Candi Permata II/180 Semarang

Rustam DKAH, M. Ag.

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A. 917 Mijen Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Purwanto

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim skripsi saudara:

Nama : Purwanto
NIM : 2102036
**Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI PENDAPAT AL-SYAFI'I
TENTANG KEHARUSAN ISTERI MENERIMA
RUJUK SUAMI DENGAN KHI PASAL 164
TENTANG KEWENANGAN ISTERI MENOLAK
RUJUK SUAMI**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang 21 juli 2008.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Slamet Hambali
NIP: 150 198 821

Rustam DKAH, M. Ag
NIP: 150 289 260

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Purwanto**
Nomer Induk : **2102036**
Judul : **STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK
SUAMI DENGAN KHI PASAL 164 TENTANG
KEWENANGAN ISRTI UNTUK MENOLAK RUJUK
SUAMI.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

21 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 1 Agustus 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

H. Ahmad Izzuddin, M. Ag
NIP. 150 290 930
Penguji I,

Rustam DKAH, M. Ag
NIP. 150 289 260
Penguji II,

Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag
NIP. 150 218 257
Pembimbing I,

Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 150 274 615
Pembimbing II,

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Rustam DKAH, M. Ag
NIP. 150 289 260

MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (Qs. Al Maidah: 49).¹

Pasal 79 KHI

- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama alam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²

¹ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 2000.

² Inpres No. I Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79. hlm.41.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Juli 2008.

Deklarator,

Purwanto

ABSTRAK

Pada dasarnya rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan antara kedua pasangan suami dan isteri, sehingga diharapkan bahwa suatu pernikahan berlangsung abadi untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu Allah SWT selalu memerintahkan agar pasangan suami isteri dapat bergaul secara baik.

Pergaulan yang ma'ruf sebagai langkah konkret untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut sulit atau bahkan tidak mungkin terlaksana, ketika salah satu pasangan tidak menghendaki untuk kembali bersatu lagi atau untuk menolak rujuk kehendak mantan suaminya.

Tatkala bahtera kehidupan dalam rumah tangga dan kesinambungannya tidak dapat lagi ditegakkan dan dipertahankan karena adanya penolakan dari pihak isteri kepada suaminya seperti yang tertuang dalam KHI pasal 164 "Bahwa seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi, sementara dalam kitab al-Umm Imam al-Syafi'i berkata bahwa ketika Allah Azzawajalla menjadikan rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami dengan KHI pasal 164 tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami? Dan mana pendapat yang lebih kuat diantara keduanya? Serta bagaimana metode istinbat hukum yang digunakannya.

Oleh karena itu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research) melalui dokumen, kitab, dan buku yang relevan dengan permasalahan akan diperoleh informasi tentang ketetapan hak rujuk dalam pernikahan. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis dan menulis secara sistematis, dengan menggunakan teknik analisis komparasi ketetapan hak rujuk dalam pernikahan, sehingga dapat dijelaskan dan diterangkan secara sistematis dan paripurna kemudian diungkapkan dan ditulis dengan menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka.

Dari penelitian tersebut kiranya dapat digeneralisasikan bahwa Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum hak rujuk dalam pernikahan didasarkan atas Nas al Qur'an surat al Baqarah ayat 228, 229 dan hadist Nabi kemudian dalam KHI pasal 79 ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, oleh karena rujuk itu mengembalikan status hukum secara penuh maka rujuk harus mendapatkan persetujuan dari mantan isterinya.

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Dengan pertolongan-Nya, limpahan rahmat serta ni'mat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membuka tabir kegelapan menuju sinar yang benderang. Semoga kita senantiasa dalam pancaran sinar dan selalu mendapatkan syafa'atnya.

Niat untuk menulis skripsi ini sebenarnya sudah cukup lama, mulai dari angan-angan sampai pada akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan ide tersebut kepihak jurusan. Setelah pihak jurusan menyetujui dan memberikan izin, penulis mulai bekerja menuangkan ide-ide sampai akhirnya selesai pada semester ini. Di sela-sela penulisan ini bukan tak ada kendala yang merupakan jalan terjal bagi penulis termasuk kendala waktu, financial dan lain-lain, namun dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi penulis dapat melewati jalan terjal tersebut.

Maka, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin sekali menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini :

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M. A selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Slamet Hambali selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Rustam DKAH, M. Ag selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai dan karyawan perpustakaan dilingkungan IAIN Walisongo Semarang yang selalu sabar melayani penulis dalam meminjam referensi.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik secara material maupun moral serta selalu mendoakan dan mengharapkan kiprah penulis. Kakak-kakakku dan adikku tersayang, terima kasih atas motifasinya.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia dimata Allah dan mahluk-Nya.

Kalau skripsi ini baik dan bermanfaat, hanyalah semata-mata karena pertolongan dan petunjuk Allah SWT. Sedangkan kalau skripsi ini kurang layak menjadi karya ilmiah, hanyalah semata-mata ketidak mampuan menulisnya dengan baik, semoga Allah SWT mengampuni.

Pada akhirnya, penulis mengakui bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi sangat penulis harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, Amin.

Semarang, 02 Juli 2008.

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini menjadi berarti.

- ✍ Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Sudjadi dan Mak Sarmi yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan dukungan baik material maupun moral.
- ✍ Kakak-kakakku tercinta H. Abdul Aziz Masduqi, Masmu'ah, Sobirin, Tasmi'ah, Santo Al Hadid, Wiwik Afifah dan adikku tersayang Muhammad Zainuri serta saudara-saudara lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.
- ✍ Ibu DR. H. Endang Rumaningsih wali studi penulis yang senantiasa mengarahkan penulis dalam menyelesaikan kuliah.
- ✍ Bapak Drs. Abdullah, M. Ag di tengah kesibukannya yang senantiasa meluangkan waktu serta membuka pintu rumahnya setiap kali penulis membutuhkan bimbingannya dan terima kasih atas pinjaman bukunya.
- ✍ Sedulur-sedulur keluarga Mahasiswa Purwodadi di Semarang (IMPG) yang selalu kompak dalam kegiatannya.
- ✍ Rekan-rekan KSR, Abdul Basit, S. Pd.I, Hidayah, S. Pd.I, Bambang, S. H.I, M. Akrom, S. H.I, Hamam, S. H.I, Niamil Huda, S. H.I, Nurimah, S. Sos.I, Zakaria, S. H.I, Burhan, S. Pd.I, Ali Abidin, S. Pd.I, Turmudi, Bariar, Abidin, Umratun Maburrah, dan yang lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

- ✍ Komunitas Puser Angin, Buyuhri, Mbak har, Joko, Bosse dan teman-teman kost Musalla Hidayatullah yang ganteng-ganteng khususnya Maijend. Muhammad Zaenal''Boby'' Mubarak terimakasih atas pinjaman komputernya. Tidak akan kulupakan jasa-jasanya yang selalu setia menemani penulis dalam suka maupun duka hingga selesainya skripsi ini.
- ✍ Teman-teman paket ASA 02, Abidin, Ahmad Zen, Adid gondrong, Gusti Rahmadi, Hanik Rosidah, Sodiqin, Umratul Mabrushah, Ana Fatmawati, Sopiah, Purnadi, S. H.I, Suluh Hening Ariadi, S. H.I, Kabul, serta yang tak dapat disebutkan satu-persatu.
- ✍ Keluarga Pak Lurah dan teman-teman team KKN XL VIII Posko 10 Desa Tlogo Wungu, Kaloran, Kab. Temanggung, bang Harjanto, M. Sodiq, M. Aniq, Saiful Anwar, Mami Endah, Lia, Anis, Impong, Hidayah, Rahmawati.
- ✍ Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam hidup penulis.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN DEKLARASI | v |
| HALAMAN ABSTRAKSI | vi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK..... | 14 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk..... | 14 |
| B. Sarat dan Rukun Rujuk..... | 19 |
| C. Macam-Macam Rujuk..... | 21 |
| D. Orang yang Mempunyai Hak Rujuk..... | 22 |
| | |
| BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK SUAMI..... | 24 |
| A. Sekilas Tentang Imam al-Syafi'i..... | 24 |
| 1. Biografi Imam al-Syafi'i..... | 24 |
| a. Kelahiran Imam al-Syafi'i..... | 24 |
| b. Guru dan Murid Imam al-Syafi'i..... | 30 |
| c. Karya-Karya Imam al-Syafi'i..... | 33 |
| d. Corak Pemikiran Imam al-Syafi'i | 37 |
| B. Ketentuan Rujuk Menurut Imam al-Syafi'i..... | 42 |
| 1. Hak Rujuk Menurut Imam al-Syafi'i..... | 45 |
| 2. Istibat Hukum Imam al-Syafi'i..... | 48 |
| a. Al Qur'an..... | 49 |
| b. Al Sunnah..... | 50 |
| c. Al Ijma' | 54 |
| d. Al Qiyas..... | 56 |
| e. Al Aqwal al Sahaby..... | 57 |

BAB IV : KETENTUAN RUJUK DALAM KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM).....59

- A. Sekilas Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam).....59
- B. Ketentuan Rujuk Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).....77

BAB V : ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK SUAMI DENGAN KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) PASAL 164 TENTANG KEWENANGAN ISTRI UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI.....81

- A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk Suami.....81
 - 1. Persamaan Pendapat Antara Imam al-Syafi'i dengan KHI.....81
 - 2. Perbedaan Pendapat Antara Imam al-Syafi'i dengan KHI.....84
- B. Analisis Istinbat Hukum Imama al-Syafi'i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk Suami.....88
- C. Pendapat yang Lebih Kuat di Antara Keduanya.....91

BAB VI : KESIMPULAN.....93

- A. Kesimpulan.....93
- B. Saran.....95
- C. Penutup.....97

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

Dengan berlangsungnya akad nikah terjalin hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan di atas pundak masing-masing terletak tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jujur, Islam memberi petunjuk dan berbagai ketentuan kepada suami sebagai kepala keluarga tentang kewajibannya yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan.²

Nikah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tujuan pernikahan tidak hanya semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis saja tapi untuk mendapatkan *mawaddah, warahmah* serta ketenangan lahir batin pasangan suami istri.⁴

Tujuan yang luhur ini senada dengan yang tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat: 21.

¹ Departemen Agama, *proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama, Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN, cet. Ke-2, 1984, hlm. 49.

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988, Cet. Ke-1, hlm. 429.

³ UU No 1 tahun 1974, tentang Perkawinan pasal. I.

⁴ Inpres. No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 3. hlm. 14.

“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...”

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang diantaramu, sesungguhnya pada yang sedemikian itu tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum : 21).⁵

Nabi Muhammad SAW memerintahkan muslim agar segera menikah bagi yang sudah mampu. Keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikahlah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini, untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya, kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah disini tidak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti berhubungan kelamin dengan istri, melainkan pada hakekatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan.⁶

Keluarga mencerminkan kerjasama dan kesetiaan yang terpadu. Dalam keluarga terbina rasa cinta orang tua kepada anak dan sebaliknya, hal itu merupakan tali pengikat yang tidak akan putus sepanjang masa. Sejak di langungkan pernikahan mulailah keluarga terbina dan timbul rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena itu hidup berkeluarga senantiasa memerlukan tanggung jawab atas tugasnya masing-

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2000, hlm. 644

⁶ Abdurahman I.Doi., *The Islamic Law*. Terj. Panji Mas “*Inilah syari'ah Islam*”, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, cet.I, hlm. 165-166.

masing. Kebiasaan rasa tanggung jawab yang demikian itu terbawa ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, yaitu bertanggung jawab keselamatan tanah air, bangsa dan agama, mereka yang tidak memahami peranan hidup berkeluarga dan tujuan pernikahan maka rumah tangganya akan mudah hancur dan putus perkawinannya.⁷

Dalam sebuah perkawinan dapat belajar saling bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.⁸

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia. Dalam Surat al Dzariyat 49.

”وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ...”

Artinya:”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Al Dzariyat 49)⁹

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.

Islam juga memberikan gambaran tentang kesejahteraan bagi umat yang menjalankan norma-norma yang berlaku baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Baik untuk hidup didunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang harmonis. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat.

⁷ Peunoh Daly, *op. cit.*, cet.I, 1988, hlm. 428.

⁸ Abdurahman I.Doi, *op. cit.*, Jilid 1, hlm. 166.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, hlm. 862

Sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.

Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci yang sedemikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan¹⁰ dan kesiapan jasmani dan rohani serta kesiapan materiel dan spiritual.

Dalam kehidupan berkeluarga sering terdapat perbedaan pendapat dan keinginan, kadang-kadang hal itu mengakibatkan sengketa dan perpecahan, kalau hal itu terjadi antara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal yang merisaukan dalam rumah tangga dan merisaukan semua pihak, maka haruslah diusahakan mengatasinya dengan kebijaksanaan. Agama Islam mengetahui kemungkinan hal itu terjadi, karena itu beberapa petunjuk telah diberikan tentang cara-cara mengatasinya supaya dapat kembali ke dalam kehidupan yang harmonis, tenang, damai dan saling mencintai sesama anggota keluarga.¹¹

Kepada pihak isteri itupun diberi petunjuk dan peringatan supaya bergaul dengan suami secara baik, ia harus mampu menjaga diri di waktu tidak bersama suaminya, isteri harus mentaati suaminya dalam yang ma'ruf,

¹⁰ Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 57

¹¹ Peunoh Daly, *loc. cit.*, hlm. 431.

mendengarkan baik-baik nasehat dan melaksanakan kewajiban dengan ikhlas.¹²

Meskipun demikian, patut direnungkan dalam pikiran bahwa isteri tidak boleh mentaati suaminya bila ia diminta mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah karena ketaatan pertama hanyalah bagi Allah. Seorang isteri harus memelihara diri dan kesuciannya serta kehormatan suaminya kapan pun suaminya tidak berada di rumah.¹³

Sudah merupakan sifat manusia bila timbul percekcoakan dan kesalahan paham di dalam keluarga. Oleh karena itu maka setiap anggota keluarga selalu dituntut untuk bertaqwa kepada Allah, bersabar dan melakukan pengendalian diri.¹⁴

Dalam Islam menyarankan bahwa perselisihan keluarga tidak usah dibawa ke sidang pengadilan. Inilah sebabnya uraian tersebut menjelaskan bahwa bila terjadi perselisihan, maka patut ditunjuk seorang penengah dari pihak keluarga istri dan seorang lagi dari pihak keluarga suami untuk mendamaikan mereka.¹⁵

Didalam al-Qur'an mengingatkan kaum laki-laki bahwa bila isterinya kembali taat dan memperbaiki dirinya, maka mereka jangan diusik atau suami jangan mencari-cari kesalahan istrinya untuk kemudian menyakitinya. Dengan demikian, hubungan di antara suami dan istri yang dijelaskan al-Qur'an sedemikian rupa: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah

¹² *Ibid.*

¹³ Abdur Rahman I. Doi, *op. cit.*, hlm. 186.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 186.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 187.

pakaian bagi mereka”. (QS. Al Baqarah: 187). Suami dan isteri saling membantu, saling menghibur dan saling melindungi.¹⁶

Tuntutan seksual selalu ingin dipuaskan, namun menurut pandangan hukum, hak-hak isteri yang berhubungan dengan suaminya adalah sama dengan hak suami terhadapnya, meskipun laki-laki satu tingkat lebih tinggi dari pada perempuan, secara sederhana menunjukkan bahwa wewenang untuk mengendalikan serta memimpin rumah tangga harus diemban oleh salah satu pihak, suami atau istri.¹⁷

Kebahagiaan setiap pasangan suami isteri yang diharapkan dari pernikahannya merupakan sarana untuk mendapatkan dan memelihara keturunan yang luhur dan mulia, menciptakan ketenteraman jiwa yang ditunjukkan dengan ketenangan, keteduhan dan kedamaian, ketenteraman hidup, cinta kasih serta untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan luhur.¹⁸

Namun tujuan perkawinan tersebut sering tidak tercapai tatkala ada perselisihan yang menyebabkan perceraian antara suami dan isteri yang dapat menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya, ketika sang isteri menolak untuk rujuk¹⁹, seperti dalam KHI pasal 164 dijelaskan bahwa seorang wanita dalam *Iddah talaq raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdur Rahman I. Doi, *op. cit.*, hlm. 188.

¹⁸ Peunoh Daly, *op. cit.*, hlm. 307

¹⁹ Pengertian rujuk menurut imam Hanafi adalah: meneruskan perkawinan dalam masa iddah roj'i. menurut imam maliki rujuk adalah: kembali kepada istri yang sudah *ditalak* tanpa akat nikah baru. Menurut Imam Al-Syafi'i rujuk adalah: mengembalikan istri yang sudah ditalak *raj'i* yang masih *iddahnya* kepada keadaan semula. Menurut imam hambali rujuk adalah: mengembalikan istri yang sudah *ditalak* bukan *bain* kepada keadaan semula sebagai istri penuh tanpa akad baru lagi. *ibid*, hlm. 385-387.

rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi.²⁰

Berbeda dengan ketentuan dalam keterangan di atas. Menurut pendapat Imam al-Safi'i dalam kitab al-Umm mengatakan sebagai berikut:

“قال الشافعي رحمه الله لما جعل الله عز وجل الزوج احق برجعة امراته في العدة كان بينها ان ليس لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لاءنها عليها لالها عليه ولا امر لها فيما له دونها.”²¹

Artinya:”bahwa ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk sebagai hak suami atas istrinya selama dalam masa iddah maka bagi istri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas istrinya dan rujuk bukan hak istri atas suaminya”.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah dan lebih fokus pada pembahasan tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami (Study komparasi pendapat Imam al-Syafi'i dan pasal 164 KHI (Kompilasi Hukum Islam)).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Imam al-Safi'i tidak memberikan kewenangan bagi isteri untuk menolak rujuk suami sementara dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 164 memberikan bagi isteri untuk menolak rujuk suami.

²⁰ Inpres No. I. Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal. 164. hlm. 71

²¹ Al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz. V. Beirut. Dar Al Fikr tt, hlm. 260

2. Apa istinbath hukum Imam al-Syaif'i tentang keharusan istri menerima rujuk suami dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami.
3. Bagaimana pendapat yang lebih *rajih* (kuat) antara Imam al-Safi'i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 164 tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami.
 - b. Untuk mengetahui istimbath hukum Imam al-Syafi'i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami.
 - c. Untuk mengetahui pendapat yang lebih *rajih* (kuat) antara Imam al-Safi'i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami.
2. Kegunaan penelitian ini adalah
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia.

- b. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan agama Islam terutama mengenai fiqh mazhab al-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Laura Intantia Krisnasari angkatan (2100078) 2000 fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul tentang, "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wata' Sebagai Syarat Sahnya Rujuk Bagi Talaq yang Jatuh Akibat Sumpah Illa'*". Disini hanya menjelaskan tentang syarat sahnya rujuk, apa bila seorang suami ingin kembali kepada bekas istrinya, akibat sumpah *illa'* maka sebagai syarat rujuk suami harus melakukan hubungan badan terlebih dahulu, apa bila tidak melakukan hubungan terlebih dahulu maka rujuknya tidak sah.

M. Chamim Supaat dalam penelitiannya di jurnal ilmu-ilmu keislaman Vol. I. No. I. Tahun 2004 Menara Tebu Ireng, tentang "*Kewenangan Isteri Menolak Rujuk dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Kajian Sosiohistoris Hukum Islam)*" beliau mengemukakan dalam hal ini bahwa proses penolakan rujuk diluar pengadilan lebih baik ditinggalkan, karena *madharatnya* lebih besar dari pada maslahat yang dikandungnya. Sebagai penggantinya, proses penolakan rujuk itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam undang-undangan. .

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan dan mengkaji pemikiran secara mendalam satu kasus yang berkaitan dengan pendapat Imam al-Syafi'i

tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami study komparasi pendapat Imam al-Syafi'i dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengingat obyek penelitian ini adalah fatwa Imam al-Syafi'i yang telah tertuang dalam berbagai tulisan, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur yaitu pengolahan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan.²²

2. Sumber Data

Oleh karena jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, maka sumber penelitian ini berupa literatur-literatur terkait, khususnya dalam bidang fiqh dan ushul fiqh yang ada kaitannya dengan fokus pembahasan baik yang ditulis secara langsung oleh Imam al-Syafi'i maupun yang ditulis oleh para pengikutnya atau para ulama dan ahli-ahli lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber skunder. Sumber primernya adalah Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Rujuk dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang Kewenangan Isteri Menolak Rujuk Suami. Sedangkan sumber skundernya

²² Mestika Ze.d, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004

adalah buku-buku, atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan.

3. Analisis Data

Dari penelaahan literatur tersebut akan diperoleh data-data yang dikehendaki berupa fatwa-fatwa Imam al-Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah beserta hal-hal yang menjadi alasannya, kemudian data-data tersebut diverifikasi sehingga didapatkan data yang relevan dengan alur penelitian berupa hak rujuk dalam nikah atau studi komparasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang kewenangan isteri untuk menolak rujuk suami, setelah itu langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan menggunakan metode komparasi non statistik yang berupa penjelasan-penjelasan bukan berupa angka-angka statistik.

Dengan menggunakan tehnik analisis non statistik maka fatwa Imam al-Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah, dalam hal ini adalah kewenangan isteri menolak rujuk suami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 164 beserta dinamika pemikirannya dapat dijelaskan dan digambarkan secara obyektif dan sistematis dengan menggunakan kata-kata verbal bukan angka statistik atau angka-angka yang lain. Mengingat penelitian ini berusaha mengkaji sebuah seseorang tokoh yang hidup pada situasi dan waktu tertentu, maka tidak menutup kemungkinan pendekatan, yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan historis adalah pendekatan yang berusaha membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kejadian atau peristiwa di masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan *mensintesis* data-data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang shahih²³. Dengan pendekatan ini dapat digambarkan dan *dikonstruksikan* kembali mengenai latar belakang adanya fatwa Imam al-Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah yang kontrafersi dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164.
- b. Pendekatan hermeneutic²⁴ adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah fatwa dalam waktu dan budaya lampau dapat dimengerti dan bermakna secara eksistensial dan situasi sekarang.²⁵ Pendekatan ini digunakan agar dinamika pemikiran dan perubahan fatwa Imam al-Syafi'i yang terjadi pada waktu dan budaya tertentu dapat dipahami dan bermakna dalam waktu dan budaya saat ini terutama dengan adanya semangat pembaruan.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum skripsi ini terbagi dalam lima bab meliputi bab I pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan,

²³ P. Joko Subagyo, S.H. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 35

²⁴ Kata Hermeneutika berasal dari kata Yunani, Hermenevin, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Istilah ini kerap dihubungkan dengan tokoh mitologis yunani, Hermes, yang bertugas menyampaikan pesan yupiter kepada manusia, mitos ini menjelaskan tugas seorang Hermes. Sibawaihi, *Hermeneutika Al Qur'an Fazlur Rahman*, Bandung: Jalsutra, cet.I,2007, hlm. 6.,lihat juga Kanisius, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, cet. V., 1999, hlm. 23.,lihat juga di Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I., 2006, hlm. 26.

²⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 84 dan lihat Uya Farid Esck. *Membebaskan Yang Tertindas : Al-Qur'an. Liberalisme, Pluralisme*, Bandung : Mizan Media Utama, 2002, hlm. 83

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II sebagai pengantar untuk memasuki bab III dan IV memuat tinjauan umum tentang rujuk dimana dalam sub babnya akan memaparkan pengertian dan dasar hukum rujuk serta tentang orang yang mempunyai hak rujuk dan pendapat fuqaha tentang rujuk.

Bab III sebagai pengantar untuk memasuki bab IV dan V memuat tentang biografi, guru, dan murid, karya-karya Imam al-Syafi'i, istinbat hukum Imam al-Syafi'i serta ketentuan rujuk menurut Imam al-Syafi'i.

Bab IV sebagai pengantar untuk memasuki bab V dan VI memuat tentang sekilas KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana sub babnya akan memaparkan tentang sejarah KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ketentuan rujuk menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Bab V merupakan analisis komparasi tentang keharusan isteri menerima rujuk suami menurut Imam al-Syafi'i dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang kewenangan isteri menolak rujuk suami dan analisis istinbat hukum Imam al-Syafi'i.

Bab VI merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran karya tulis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Rujuk

Pengetahuan tentang pengertian dan dasar hukum yang memadai akan bermanfaat sebagai dasar pijakan dalam membahas permasalahan lebih lanjut. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan tentang kewenangan istri menolak rujuk suami dalam pernikahan, terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan dasar hukum rujuk.

1. Pengertian Rujuk

Kata "Rujuk" menurut bahasa berasal dari kata masdar "*Raja'a Yarji'u Rujuu'an waraja'atan*" yang bermakna "Kembali" ¹ atau kembali kepada asal.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata "Kembali" mempunyai beberapa arti sebagai berikut: Pertama, Baik menuju tempat semula, pulang Kedua: Kembali kepada asalnya, Kembali uang Ketiga: Uang kelebihan pembayaran, sekali lagi, berulang lagi.³

Ketiga makna tersebut semuanya memberikan makna rujuk ditinjau dari bahasa, sedangkan menurut istilah, rujuk mempunyai definisi sebagai berikut. Ulama' Hanafiyah memberi pengertian:

استدأمة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها الأولى.⁴

¹ Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar*, Dar Kutub al-Alamiyyah, tt., juz. V., hlm. 23

² M. Yunus, *kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, tt, hlm. 138.

³ Pius Abdilah, dan. Anwar Syarifudin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt, hlm. 178.

⁴ Ibn Abidin, *loc. Cit.*

Artinya: *“Tanggungan milik yang terjadi pada masa iddah sebab kembalinya isteri pada suaminya dan kembalinya isteri kepada tingkah perbuatan yang pertama.”*

Kemudian Ulama' Syafi'iyah memberi pengertian rujuk sebagai berikut:

رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.⁵

Artinya: *“Kembalinya wanita terhadap nikah dari talaq selain ba'in pada masa iddah pada arah yang khusus, atau pada jalan yang khusus.”*

Pengertian rujuk menurut Ulama' Malikiyyah yaitu:

عود الزوجة المطلق من غير تجديد عقد.⁶

Artinya: *Kembalinya isteri yang ditalaq tanpa selain memperbaiki akad*

Sedangkan pengertian rujuk menurut Ulama' Khanabillah adalah:

إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.⁷

Artinya: *“Kembalinya wanita yang ditalaq dari gairu ba'in terhadap sesuatu selain akad”.*

Menurut Drs. H. Djaman Nur, rujuk adalah Mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya thalaq raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.⁸

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., pengertian, rujuk adalah berasal dari bahasa Arab *“raja'a – yarji'u – ruju'an”* bentuk masdar artinya *“kembali”* istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian rujuk adalah kembalinya

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Drs. H. Djaman Nur, *fiqh munakohat*, Semarang: Cv Toha Putra, cet.I, 1993, hlm. 174.

suami kepada hubungan nikah dengan isteri yang telah diceraikan *raj'i* dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa iddah.⁹

Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami isteri itu mengalami masa-masa kritis konflik di antara mereka yang diakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan nafas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna meranda hari esok yang lebih baik lagi.

Mereka kembali kepada keutuhan ikatan perkawinan, yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing, dan bertekad untuk memperbaikinya. Dari sisi ini, perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing suami isteri untuk menatap secara jernih, komunikasi, saling pengertian dan romantika perkawinan yang mereka jalani.

2. Dasar Hukum Rujuk

Hak rujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang dithalaq *raj'i* yang dinyatakan dalam firman Allah SWT al Qur'an surat al Baqarah Ayat 228

"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا."

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (damai)". (Qs. Al Baqarah: 228).¹⁰

⁹ Ahmad Rofiq. M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.6, 2003, hlm. 320.

¹⁰ Departemen Agama.RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Cv karya Utama, 2000, hlm. 55.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa rujuk yang dilakukan dalam masa iddah itu, setatusnya sama dengan nikah baru, setelah masa iddah. Artinya talaq *raj'i* sudah mengurangi jumlah talaq yang menjadi hak suami. Apakah suami merujuknya selama dalam masa iddah atau membiarkan masa iddah isterinya habis kemudian si suami menikahinya dengan akad yang baru.

Malahan sekiranya *iddah raj'i* itu dibiarkan habis dan dibiarkan juga menikah dengan laki-laki lain, kemudian mereka bercerai, dan menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama maka jumlah talaq yang menjadi hak suami tinggal sisanya. Tidak di benarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk, itu dengan tujuan yang tidak baik, misalkan untuk menyengsarakan bekas isterinya itu atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zalim, sedangkan berbuat zalim itu di haramkan. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 231.

"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا"

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang maruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang maruf pula, janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemazharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka". (Al Baqarah: 231).¹¹

Apabila suami menjatuhkan talaqnya di waktu isteri sedang haid maka suami wajib merujuk isterinya kembali, karena talaq di waktu haid

¹¹ Ibid., hlm. 56

tidak sesuai tuntutan, atau disebut dengan *talaq bid'i* ketentuan ini sesuai Umar r.a, bahwa anaknya mentalaq isterinya di waktu haid lalu Umar r.a bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tersebut lalu Rasulullah bersabda kepada Umar r.a untuk memerintahkan kepada anaknya agar merujuk isterinya, dengan sabda beliau sebagai berikut:

مره فليرا جعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم يحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمسن فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء.

Artinya: "Perintahkanlah ia (anakmu), hendaklah ia merujuk isterinya lalu ia memeliharanya sehingga suci dari haid, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian jika ia mau hendaklah ia peliharalah sesudah itu, atau jika ia berkehendak boleh ia mentalaknya sebelum ia mencampurinya. Demikian itulah waktu yang di izinkan Allah bagi suami untuk mentalak isterinya."¹²

Dalam surat al Baqarah ayat 231 menganjurkan kepada suami supaya rujuk kepada isterinya dengan mempunyai maksud baik untuk mensejahterakan lahir dan batin serta hidup bersamanya dengan rukun dan damai. Apabila suami membiarkan masa iddah isterinya berlalu tanpa melakukan rujuk, berarti ia meneruskan perceraianya.

Rasulullah pernah bersabda, bahwa malaikat Jibril datang kepadanya dan menyuruhnya rujuk kepada isterinya Hafsa, karena ia adalah seorang isteri yang sangat sabar dan rajin mengurus rumah tangga, ia akan menjadi isteri Nabi di surga. Rasulullah SAW bersabda.

"فما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لعمرحين أخبره ان ابنه طلق زوجته: مرابنك فليرا جعها, كما روى

¹² Departemen Agama, *Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu fiqh*, Jakarta: IAIN, cet. 2, 1984/1985, hlm. 285.

انه عليه السلام لما طلق حفصة جاءه جبريل فقال له: ارجع حفصة فاءتها صوامة قوامة فراجعها¹³.

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar tatkala Umar memberitahukan kepada beliau bahwa anaknya mentalak Isterinya (maka Nabi bersabda) (perintahkanlah anakmu untuk merujuk istrinya). Sebagai mana yang telah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika mentalaq Hafsa maka Jibril datang dan berkata kepada Nabi: Rujuklah Hafsa maka Nabi merujuknya".

Para Ulama' ahli Fiqh telah bersepakat jika seseorang yang merdeka mentalaq isterinya kurang dari tiga dan seseorang hamba yang mentalaq isterinya kurang dari dua adalah merupakan *talaq raj'i* seperti Ijma' para Ulama' yang berbunyi sebagai berikut.

"فقد اجمع أمة الدين على ان الحر اذا طلق دون الثلاث, وا لعبد اذا طلق دون اثنتين رجعيًا, كان لهما حق الرجعة اثناء العدة, لم يخالف في ذلك احد"¹⁴.

Artinya: "Para Ulama' ahli Fiqh telah bersepakat jika seseorang yang merdeka mentalaq kurang dari tiga dan seseorang hamba yang mentalaq Isterinya kurang dari dua adalah merupakan *talaq raj'i*, maka keduanya memiliki hak untuk merujuknya (Isteri masing-masing ditengah-tengah masa iddah selama masa iddah nya belum habis), dan tidak ada seseorang Ulama' pun yang berbeda dari yang demikian".

B. Syarat Dan Rukun Rujuk

1. Istri

Isteri yang boleh dirujuk suaminya ialah

- Isteri yang sudah *diwatha'* oleh Suaminya.
- Isteri yang baru mengalami *talaq raj'i* (*talaq* pertama atau *talaq* kedua).

¹³ Badrun, *Fiqh Muqaren Liahwal Assyahsiyah.*, juz.I, tt, hlm. 366.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 366.

- c. Perceraian dengan wanita itu bukan dengan jalan *khuluk* (talaq tebus).
- d. Wanita itu masih dirujuk oleh suaminya, seperti ia masih tetap sebagai seorang muslimat.
- e. Isteri yang tertentu, yakni bagi suami yang mempunyai beberapa orang isteri dan dicerainya lebih dari satu orang (ada yang cerainya karena talaq dan ada pula atas putusan hakim) maka isteri yang dirujuk itu haruslah jelas dan sebaiknya disebut namanya.
- f. Talaq pertama yang dijatuhkan suami tidak boleh mengandung suatu sifat yang membayangkan sifat talaq bain, atau suatu talaq yang musabahahat (suatu talaq yang diserupakan dengan sesuatu yang sangat besar atau sangat dahsyat), sebab talaq demikian termasuk talaq *ba'in*.
- g. Bahwa perceraian dengan perempuan itu bukan dengan cara *fasakh* nikah. Cerai dengan *fasakh* tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru seperti yang berlaku pada *ba'in suqhra*.¹⁵

2. Suami

- a. Suami harus sehat akalnya; Karena itu orang gila tidak sah rujuk sebab mereka juga tidak sah menjatuhkan talaq kepada isteri mereka. Demikian pula orang yang sedang tidur. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan rujuk itu harus dikerjakan secara sadar dan insaf akan tugas kewajiban yang terpikul di atas pundak suami.
- b. Suami harus sudah baligh; tidak sah rujuk bagi suami yang masih anak-anak karena kekuatan hukum rujuk itu sama dengan yang terdapat pada akad Nikah.
- c. Rujuk itu dilakukan atas kemauan sendiri dan kesadarannya sediri, rujuk tidak sah atas paksaan orang lain. Perbuatan orang yang dipaksa tidak diakui sah oleh Syari'at Islam dan berakibat rujuknya tidak sah pula.

3. Sighat, yaitu Lafal untuk menyatakan rujuk.

- a. Lafal itu harus dapat mengungkapkan maksud rujuk dalam hal ini ada dua kemungkinan
 - 1. Lafal sarih dalam bahasa Arab ialah seperti *Radadtukilayya* (kukembalikan engkau padaku) yaitu kata suami kepada isterinya "aku rujuk padamu" ini adalah pernyataan suami yang jelas untuk rujuk kepada isterinya. Dalam kalimat tersebut yang menjadi lafal sarih ialah "*Radda*" dalam Al-Quran dan hadist terdapat tiga lafal yang menunjukkan lafal sarih untuk rujuk. Ialah "*radda*, *raja'a*, dan *Amsaka*" artinya kembali lagi rujuk.

¹⁵ Talaq Bain Suqhra adalah Talaq yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas Suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak Nikah baru kepada bekas Istrinya itu., H. Djaman Nur, *op.cit.*, hlm.140..

2. Lafal kinayah di antaranya dalam bahasa arab : "*Nakaha*" atau "*Tazawwaja*" seperti dalam susunan kalimat : "*Nakahtuki*" atau "*Tawwajtuki*" kedua kata itu adalah lafal sarikh bagi akad nikah karena itu tidak mungkin dipergunakan sebagai lafal sarikh bagi rujuk, karena itu wanita itu hanya boleh dirujuk dalam masa Iddah.
- b. Lafal itu harus bersifat Munjazah, yaitu rujuk langsung berlaku sehabis lafad itu diucapkan. Lafal itu tidak boleh berkait dengan sesuatu sarat seperti kata suami: "aku rujuk padamu jika engkau kukehendaki" ucapan yang demikian tidak sah untuk rujuk meskipun isterinya menjawab: "aku menghendakinya".
- c. Tidak boleh lafal itu di kaitkan dengan batas waktu seperti kata suami "aku rujuk padamu selama sebulan", rujuk yang demikian tidak sah¹⁶ " melalui sindiran misalnya " saya pegang engkau " atau saya kawin engkau dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya. Siqhat itu sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan pada sesuatu. Umpamanya dikatakan, " saya kembali kepadamu jika engkau suka atau kembali kepadamu kalau sianu datang "rujuk yang di gantungkan seperti itu tidak sah.¹⁷

C. Macam-Macam Rujuk

1. Rujuk bilqauuli (sharih yaitu dengan ucapan)

Seperti pendapatnya Imam al-Syafi'i, ia mengatakan rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan, karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya dalam iddah. Kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar, sebab percampuran tersebut tergolong pada percampuran *suyubhat*¹⁸.

2. Rujuk bilfi'li (yaitu dengan perbuatan)

Seperti pendapatnya Imam Maliki, ia mengatakan bahwa rujuk boleh dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk, akan tetapi bila

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu setudi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunah dan Negara-negara Islam.*, Jakarta: PT Bulan Bintang. Cet. I. 1988, hlm, 392-396

¹⁷ H.Sulaiman Rasid, *fiqih islam (hukum fiqih lengkap)*, Bandung: PT Sinar Baru Al gensindo, cet.27, 1994, hlm.420.

¹⁸ Muhammad Jawad Muqniyyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah*, (tej) Masykur (ed.el) *Fiqh Lima Majhab*, Jakarta: Lentera, cet. 6., 2007. hlm. 482.

suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadsi isterinya kepadanya, namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.¹⁹

Kemudian Imam Hambali mengatakan rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk, sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.²⁰

Dan Imam Hanafi mengatakan rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalaq dan wanita yang ditalaqlnya dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi.

D. Orang Yang Mempunyai Hak Rujuk

Rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam masa Iddah talaq raj'i, tidak disaratkan adanya ridha dari isteri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut. Ini adalah hak yang ditetapkan oleh Syara' bagi suami, maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalaq isterinya dengan talaq raj'i, misalnya suami berkata: saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu, maka hak rujuk tetap tidak gugur karena yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

demikian itu merupakan sesuatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang disyariatkan oleh Allah SWT,²¹ dalam firmanya.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya:”Talak yang dapat dirujuk dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.(Qs Al Baqarah: 229).²²

Dan tidak ada seorangpun yang dapat merubah ketetapan atau ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT.²³

Imam al-Syafi’i berkata ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya²⁴, ketika ada firman Allah dalam surat al Baqarah.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

Artinya:”Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.(Qs. Al Baqarah: 228)²⁵

²¹ Badrun, *op. cit.*, hlm. 366.

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.* hlm. 55.

²³ Badrun, *lok. Cit.*

²⁴ Muhammad Idris al-Syafi’i, *Al Umm*, Dar al Fikr, tt, juz. V, hlm.260.

²⁵ Departemen Agama RI, *loc.cit.*

BAB III

PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN ISTRI

MENERIMA RUJUK SUAMI

A. Sekilas Tentang Imam Al-Syafi'i

1. Biografi Imam al-Syafi'i

Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mengidentifikasi Imam al-Syafi'i secara rinci dan lengkap. Sebagai ulama' terkemuka, tentu ia mempunyai latar belakang hidup dan gagasan jug ide-ide yang dilontarkan, maka dalam sekripsi ini maka penulis akan memaparkan biografi kehidupan Imam al-Syafi'i dengan harapan mampu mengintergrasikan pemikirannya tentang hukum Islam sehingga menghasilkan suatu analisis dan kesimpulan yang komprehensif.

a. kelahiran Imam al-Syafi'i (150 – 204 H).

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris al-Abas Ibn Ustman Ibn Syafi'i Ibn al Saib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd Al-Muthalib, Ibn Abd Manaf. ia dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat palestina) pada tahun 150 H, kemudian oleh ibunya dibawa ke Makkah, ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.¹

Idris (ayah Imam al-Syafi'i) adalah orang yang fakir, dari bangsa Hijaz, yang transmigrasi dari Makkah al Mukaramah ke Syam, dan berdomisili didesa Gaza, juga di Asqalan dinegara Palestina

¹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-1, hlm. 27. lihat juga di Harunasution (ed. el), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 885. lihat juga di Abdullah Sulaiman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Imam al-Syafi'ai*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, cet. I., 1996, hlm. 32.

kemudian Idris meninggal dunia hanya beberapa bulan setelah lahirnya Muhammad (sang anak) maka barulah setatus Muhammad bin Idris menjadi yatim yang hanya dirawat sang Ibu. Imam abu al-Syafi'i adalah cucu perempuan dari saudara perempuan Fatimah binti As'at, Ibu Imam Ali Ibn Thalib. Oleh karena itu Imam al-Syafi'i mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah putra pamanku dan putra bibiku.²

Pada saat Muhammad bin Idris berumur 2 tahun, oleh Ibunya dia diajak pindah ke Makkah lagi didesa Sya'bul Khaif dekat dengan Masjidil Kharam.³ Imam al-Syafi'i merupakan manusia dua zaman lahir pada zaman pemerintahan Umayyah dan meninggal pada zaman pemerintahan bani Abbas. Ketika Imam al-Syafi'i berumur 19 tahun, Muhammad al Mahdi diganti oleh Musa al Mahdi (169 – 170 H / 785 - 786 M) yang berkuasa hanya satu tahun. Kemudian Ia diganti oleh Harun al Rasyid (170 – 194 H / 786 – 809 M). Pada awal kekuasaan Harun al Rasyid Imam al-Safi'i berusia 20 tahun, Harun al Rasyid digantikan oleh al Amin (194 – 198 H / 809 - 813 M), dan al Amin digantikan oleh al Makmun (198 – 218 H / 813 – 833).⁴

Pendidikan Imam al-Syafi'i dimulai dari belajar membaca Al Qur'an. Dalam usia kanak-kanak, Imam al-Syafi'i diikutsertakan belajar pada suatu lembaga pendidikan di Makkah, tetapi Ibunya tidak mempunyai biaya pendidiks sebagai mana mestinya. Sebenarnya, guru

² Abdurrahman Asy Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh (terj) HM. H. Al Hamid Al Husaini*, Pustaka Hidayah, hlm. 382.

³ Al Imam Abdullah Muhammad bin Idris Al-Safi'I, *Al Um*. Juz. 1. Dar Al Fikr, tt, hlm. 6.

⁴ Jaih Mubarak, op. cit.

yang mengajarnya hanya terbatas memberikan pelajaran kepada anak-anak yang agak besar. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa setiap apa yang diajarkannya kepada Imam al-Syafi'i dapat dimengerti dan dicerna dengan baik, lagi pula setiap kali ia berhalangan ternyata Imam al-Syafi'i sanggup menggantikan gurunya meneruskan apa yang diajarkan kepadanya terhadap anak-anak lain, akhirnya Imam al-Syafi'i dipandang sebagai murid yang bantuannya lebih besar dari pada bayaran yang diharapkan dari ibunya. Oleh karena itu Imam al-Syafi'i dibiarkan terus belajar tanpa dipungut bayaran.⁵

Sejak usia dini ia telah memperlihatkan dan sampai yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun Imam al-Syafi'i sudah mampu menghafal seluruh al Qur'an dengan lancar. Setelah dapat menghafal al Qur'an Imam al-Syafi'i berangkat kedesa badui, banu Hudzail, untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Disana selama bertahun-tahun Imam al-Syafi'i mendalami bahasa, kesustraan, dan adat-istiadat Arab yang asli. Berkat ketekunan dan kesungguhannya Imam al-Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab dan kesusastraannya, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat-istiadat Arab yang asli.⁶

Kemudian ia mulai belajar menghafal banyak hadits untuk itu ia turut serta belajar pada guru-guru tafsir dan guru-guru ahli dibidang Ilmu hadits. Pada masa itu harga kertas sangat mahal untuk mencatat

⁵ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 383.

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Esklopedi Islam*, cet. Ke-3., Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 327.

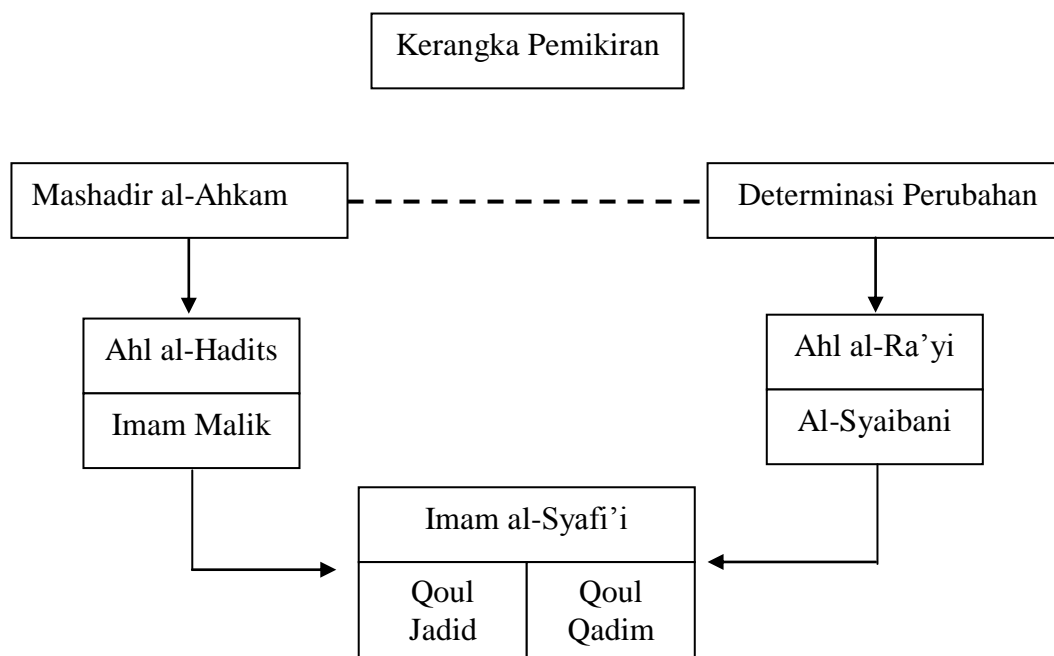
pelajaran ia mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lebar dan besar. Diatas tulang-belulang itulah ia menulis catatannya. Bila tidak di temukanya tulang, ia pergi ke diwan (tempat masyarakat mencatatkan berbagai urusan dalam kehidupan sehari-hari semacam kantor) untuk mengumpulkan buangan kertas yang bagian belakangnya masih dapat digunakanya untuk menulis catatan-catatan pelajaran.

Pada saat ia sedang mempelajari dan mengkaji nash-nash al Qur'an dan al Hadits (al Sunnah) Ia merasa masih banyak membutuhkan tambahan bekal Ilmu bahasa Arab untuk dapat mendalami dan memahami makna-makna kalimat yang tersirat dalam susunan atau rangkaiannya. Ketika itu Imam al-Syafi'i turut mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Imam al Layst, seorang Imam besar pada masanya yang diberikan oleh murid-murid di Masjidil Haram.⁷

Dari segi riwayat hidup Imam al-Syafi'i pernah berguru kepada dua guru yang aliranya berbeda. Pertama ia berguru kepada Imam Malik, yang merupakan penerus madrasat al Hadits, pujiannya karya Imam Malik, al Muwwatha' adalah kitab terbaik setelah al Qur'an, dan ia belajar kepada Imam Malik di Madinah. Kedua, ia juga berguru kepada Muhammad al Syaibani yang merupakan sahabat dan penerus Mazhab Hanafi. Sebagaimana diketahui bahwa aliran Hanafi merupakan penerus aliran kuffah atau madrasat al Ray'. Dengan

⁷ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 384.

mengacu kepada perjalanan intelektual Imam al-Syafi'i, kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut⁸.



Dengan demikian, dalam diskusi dan peradaban, Imam al-Syafi'i tidak hanya mengemukakan pendapatnya saja, tetapi beliau juga mengemukakan pendapat yang lain yang berlawanan dengan pendapatnya. Demikian cara yang ditempuh oleh Imam al-Syafi'i dalam berdebat, untuk mencapai kebenaran, beliau juga mengambil jalan tengah antara Ahl al Ra'yi dan Ahl Al-Hadits, bahkan ia menjembatani antara keduanya.⁹

Imam al-Syafi'i terlalu banyak menulis dan mengajar, sehingga penyakit yang dideritanya ambien bertambah parah. Disamping penyakit lain yang dideritanya, penyakit bawasir yang dideritanya bertambah parah akibat terlalu keras dalam bekerja. Kepada sahabat-

⁸ Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm. 13.

⁹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 396.

sahabatnya yang menemaninya dirumah, ia mengatakan sebenarnya, bahwa ia mengetahui benar penyakit yang dideritanya, tetapi ia mengaku tidak mengindahkan petunjuk dari kedokteran.¹⁰

Sesungguhnya ia memerlukan istirahat serta terlalu banyak menulis dan mengajar. Beberapa hari kemudian, Imam al-Syafi'i meninggalkan rumah untuk mengajar kembali. Pada saat itu, kelompok orang-orang yang keras kepala mengintai dan menunggu kesempatan hendak menyerangnya. Usai mengajar, semua peserta bubar. Imam al-Syafi'i tinggal sendiri di Masjid agung tempat beliau mengajar dalam keadaan kosong dan sunyi. Tibalah saatnya bagi orang-orang yang keras kepala yang sudah lama mengintai untuk mulai bertindak. Imam al-Syafi'i diserbu dan di kroyok serta di pukuli beramai-ramai dengan batangan-batangan kayu yang mereka sembunyikan dalam pakaian. Mereka terus-menerus memukulinya hingga beliau tersungkur dan pingsan. Melihat Imam al-Syafi'i tergeletak, kelompok fanatik itu lari.¹¹

Dalam keadaan tidak sadar Imam al-Syafi'i diangkat kerumahnya, setelah siuman beliau merasa nyeri akibat pukulan-pukulan itu, pada bagian badanya tampak memar dan berdarah. Pada malam jum'at tanggal 28 Rajab tahun 204 H, Imam al-Syafi'i pulang kehariban Allah SWT dalam usia 54 tahun, beliau meninggalkan kehidupan ini setelah merantai bumi dengan ilmu fiqh sepanjang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 435.

¹¹ *Ibid*.

usianya yang tidak panjang. Keesokan harinya, hari jum'at terahir bulan rajab, jenazahnya diangkat kerumah Sayyidina Nafisah, wanita Ahl Bait, Rasulullah SAW itu menshalatinya, usai shalat Ia berucap'' ia seorang pria yang berwudlu dengan baik'', yang dimaksud '' wudlu'' adalah pokok ibadah, yakni ia seorang pria yang salih dan baik ibadahnya''. Demikianlah Imam al-Syafi'i . wafat sebagai pahlawan ahli pikir, setelah mengarungi kehidupan dunianya dengan perjuangan dan pemikirannya.¹²

b. Guru dan Murid Imam al-Syafi'i.

Tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah sikap dan tingkah laku peserta didik menuju pada keadaan yang lebih baik, dalam hal ini keteladanan guru merupakan salah satu metode pendidikan yang dianggap efektif. Sejalan dengan ini kepribadian guru menempati posisi penting dalam pembentukan kepribadian dan pola pikir murid-muridnya. Guru yang baik selalu di cintai, di jadikan idola dan ditiru dalam banyak hal oleh murid-muridnya.

Dikalangan fuqaha, terbentuknya majhab-majhab erat kaitannya dengan keteladanan seorang Imam terhadap murid-muridnya. Para murid yang mendapatkan kepuasan intelektual dari sajian ilmu Imamnya akan memandang Imam tersebut. Sebagai tokoh ideal dan menempatkan dirinya sebagai penerus atau pengembang mazhab gurunya. Dalam waktu yang cukup lama Imam al-Syafi'i

¹² *Ibid*, hlm. 436.

menganut aliran *fiqh Ahl Al Hadits* yang diperolehnya dari Hijaz, Makkah dan Madinah, akan tetapi pengaruh *Ahl Al Ra'yi* yang di dapatnya dari Bagdad cukup jelas tampak dalam majhabnya.

Dari riwayat pendidikannya menunjukan bahwa Imam alSyafi'i telah menimba ilmu pengetahuan dari sejumlah guru yang tersebar di empat wilayah yaitu Makkah, Madinah, Yaman, dan Irak. Ulama' Makkah yang menjadi gurunya ialah Sufyan Ibn Uyainah,¹³ Muslim Ibn Khalid al Zanj, ¹⁴ Said Ibn Salim al Kaddah, Daud Ibn Abdurrahman al Atthar,¹⁵ dan Abdull khamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Zuwad. ulama' madinah yang menjadi gurunya ialah Malik bin Anas,¹⁶ Ibrahim Ibn saad al Anshori, Abul Aziz Ibn Muhammad al Dahrawardi, Ibrahim Ibn Abi Yahya al Aslami, Muhammad Ibn Said Ibn Abi Fudaik dan Abdullah Ibn Nafi'. Ulama'-Ulama' Yaman yang

¹³ Nama aslinya adalah Abu Muhammad Sufyan Ibn Uyainah al Kufi al Makki al Hilali, Ia adalah *tabi' al tabi'in* yang lahir *dikuffah* 107 H dan wafat 198 H, Ia dikenal sebagai Imam yang alim, *zuhud dan wara'* serta ahli hadist teliti dalam keilmuannya para Ulama', sepakat bahwa riwayatnya adalah shohih diantara Ulama' yang meriwayatkan hadist darinya ialah al-Safi'i, Ahmad Ibn Hambal dan al Tsauri.

¹⁴ Nama aslinya adalah Abu Khalid Muslim Ibn Khalid al Zanj al Makki al Qurraisi al Makhzum (w. 179). Ia termasuk golongan *tabi' al tabi'in* yang sempat bertemu dan belajar kepada beberapa orang *tabi'in* seperti Ibn Abi Malikah dan al Zuhri,. Ia dipercaya memegang jabatan *Mufthi* dikota Mekkah, Safi'i dan beberapa orang ulama', meriwayatkan hadist darinya, akan tetapi kedudukanya sebagai perawi hadist masih dipermasalahkan.

¹⁵ Wafat pada tahun 174 H ayahnya adalah seorang tabib beragama Kristen, ia pindah dari negerinya, *Syam ke Makkah* dan kemudian masuk Islam. Daud inilah yang banyak meriwayatkan hadist.

¹⁶ Wafat pada tahun 179 H dari sekian banyak guru tampaknya Imam Malik menempati posisi paling penting, melalui bimbinganya Safi'i mencapai tingkat kesempurnaan dalam penggunaan *fiqh* sehingga dianggap layak untuk berfatwa. Sebagai ulama' Ahl al Hadits Imam Malik adalah seorang ulama' hadits dari generasi *tabi' al tabi'in* Ia sempat belajar dan mendengar langsung dari sejumlah *tabi'in* seperti Nafi', al Zuhri, Al Munkadir, Abu al Zuhri, Abdullah Ibn Dinar dan lain-lain. Para ulama' hadist sepakat bahwa Malik adalah seorang *Tsiqqah*, al Bukhari mengatakan bahwa rangkaian *sanad* yang terdiri atas Malik, Nafi' dan Umar adalah *sanad* yang paling sah.

menjadi gurunya Mutharraf Ibn Mazin,¹⁷ Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn Abi Salamah dan Yahya Ibn Hasan.

Sedangkan ulama' Irak yang menjadi gurunya ialah Waqi' Ibn Jarrah, Abu Asamah, Hammat Ibn Usamah, Ismail Ibn Ulaiyah, Abdul Wahab Ibn Abdul Majid dan Muhammad Ibn Hasan al Syaibani,¹⁸ yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya dan dari al Syaibani inilah ia mengenal *fiqh aliran Ahl Al-Ra'yi*.¹⁹

Dalam pengembaraannya yang panjang, Imam al-Syafi'i tidak hanya belajar Ilmu pengetahuan saja tapi juga mengajar dan menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Ia pernah mengajar di Masjid Nabawi Madinah, Masjid al Haram Makkah, Masjid Amr Ibn Ash di Fustat Mesir dan beberapa Masjid di Irak sehingga banyak melahirkan ulama'-ulama' besar hasil didikanya yang tersebar ditiga kota yaitu Kota Makkah, Baqdad dan Mesir.

Murid-murid Imam al-Syafi'i di Makkah antara lain Abu Bakar al Humaidi (w.219) Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al Abbas al

¹⁷ Nama aslinya adalah Abu Ayub Muttharrif Ibn Mazin al Kinani (w. 191 H) kedudukannya dalam bidang fiqh cukup penting, Ia dipercaya menjabat sebagai *qadhi'* di *Shina'I* (Ibukota Yaman).

¹⁸ Ia wafat pada tahun 189 H. pada saat itu Ia memegang kepemimpinan fiqh mazhab Hanafi dan pernah mejadi *qadi'* di *al Rakkah* Ia adalah Maula dari Bani al Syaiban dilahirkan di *Wasith* pada tahun 123 H dibesarkan di *Kuffah* dan menetap di *Baqdad*, Ia meriwayatkan hadist-hadist dari Mus'in Ibn Kidam, Sufyan al Tsauri, Malik Ibn Anas. Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'I*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2001, cet. Ke-1, hlm. 23-28.

¹⁹ Dalam menguasai fiqh Madinah, Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai *fiqh Irak* Ia berguru pada al Syaibani yang merupakan pelanjut dan pengembangan fiqh Hanafi. Disamping itu Ia juga mempelajari *fiqh Al Auza'i* dari Umar Ibn Abi Sa'lamah dan mempelajari *fiqh Al Laits* dari Yahya Ibn hasan. *Ibid.*, hlm. 241 dan Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm. 30.

Mathabiq (w. 237), Abu al Walid Musa Ibn Abi al Jarud dan Abu bakir Muhammad Ibn Idris,²⁰

Murid-murid di Bagdad antara lain; Abu Ali al Hasan al Za'farani (w. 260) ia adalah penulis kitab-kitab Syafi'i di baqdad yang paling terkemuka, Abu Ali al Hasan Ibn Ali al Karibisy (w. 256), Abu Tsaur al Kalby (w. 240), Ahmad Ibn Muhammad Ibn Yahya al As'ary, Ahmad Ibn Khambal (w. 241).²¹

Diantara murid-muridnya di Mesir ialah Harmalah Ibn Yahya, Abu Ya'kub Yusub Ibn Yahya al Buwaity (w. 231), Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al Muzani (w. 264), Muhammad Ibn Abdilah Ibn Abdul Hakam (w. 268), al Rabi' Ibn Sulaiman Ibn Daud al Jizy (w. 257), dan al Rabi' Ibn Sulaiman Ibn Abdul Jabar Ibn Kamil al Muradi (w. 257).²²

c. Karya-karya Imam al-Syafi'i dan Rujukan Syafi'iyah

Imam al-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (al Adab) dan lain-lain.²³

²⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, (Terj): Sabil Huda dan H. A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991, cet. Ke-1, hlm. 151.

²¹ Ia adalah Ulama' yang ahli Ilmu hadits yang mengarang kitab-kitab hadits dan kitab-kitab fiqh dan pada perkembangan selanjutnya Ia mendirikan dan mengembangkan mazhabnya sendiri. Muhammad Abu Zahra, *op. cit.*, hlm. 160-165., lihat juga di Ahmad Asy-Syurbasi, *lok. Cit.*

²² Muhammad Abu Zahra, *lok. Cit.*, lihat juga di Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 152.

²³ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 160.

Dalam jilid keempat belas dari kitab “Mu’jam al Udaba’”. Yakni menerangkan berpuluh nama kitab yang dikarang oleh Imam al-Syafi’i, jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang dimaksudkan. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Imam al-Syafi’i sebagian ada yang didokumentasikan melalui karya-karya baik yang ditulis secara langsung oleh beliau sendiri atau para pengikutnya, pada periode pertumbuhan Majhab, di Baqdad beliau menulis beberapa kitab yang memuat fatwa-fatwanya, sedangkan pada periode selanjutnya setelah beliau hijrah ke Mesir, ia juga menulis fatwa-fatwanya. Kitab yang pertama kali ditulis ialah al-Risalah , kitab ini disusun di Makkah atas permintaan Abdurrahman Ibn al Mahdi, sebenarnya masih banyak kitab-kitab lain yang disusun di Makkah, tapi tidak dikembangkan, namun setelah beliau melawat ke Baqdad yang kedua kalinya barulah karya-karyanya dikembangkan dan dipublikasikan.²⁴

Abdurrahman Ibn al Mahdi dan Said al Khatab memandang tinggi terhadap kitab al-Risalah, seterusnya mereka yang ada pada masa itu dan setelahnya. al-Mizan berkata, walaupun beliau nampaknya keterlaluhan: “Aku membaca al-Risalah sebanyak lima ratus kali, setiap Aku baca Aku dapati hukum yang baru” beliau berkata lagi: Aku menatap kitab al-Risalah sejak limapuluh tahun lalu

²⁴ Tm. Hasbi Assidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Jilid ke-2., 1973, hlm. 261. lihat juga di Ahmad Asy-Syurbasi, *lok. Cit.*

pada tiap-tiap kali Aku membacanya Aku dapat suatu perkara yang baru.²⁵

Karya-karya Imam al-Syafi'i yang disusun di Baqdad adalah memuat fatwa-fatwanya yang dikenal dengan sebutan Qaul Qadim meliputi al Risalah (al Qadimah),²⁶ dan al Hujjah,²⁷ yang selalu disebut dengan al kitab al Qadim. Kitab al Hujjah dan fatwa-fatwa lainnya, pada periode ini diriwayatkan oleh empat sahabat yang terkemuka di Baqdad yaitu al Karabisy,²⁸ al Za'farani, Abu Tsaur al Kalby,²⁹ dan fiqh Ahmad Ibn Hambal (w. 241). Mereka inilah yang menjadi rujukan fiqh Imam al-Syafi'i di Baqdad pada awal abad ke-3 H, tokoh-tokoh penting seperti Abu Dawud al Zahiri, Ibn Jarir al Thabari dan banyak ulama'-ulama' lainnya yang mempelajari kitab tersebut Ashab Imam al-Syafi'i di Baqdad tersebut.³⁰

²⁵ Ahmad Asy- Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 160-161

²⁶ *Al Risalah (al Qadimah)* ini sama dengan *al Risalah (al Jadidah)* yang akan disebut kemudian adalah kitab Ushl fiqh yang memuat kaidah-kaidah yang secara taat atas diaplikasikan oleh Syafi'i dalam ijtihadnya. Setelah berada di Mesir, Ia menyusun kembali kitabnya ini (*al Risalah al Jadidah*) yang dikenal dan beredar sampai sekarang. Diantara kitab tersebut terdapat juga sedikit perbedaan misalnya tentang kedudukan *Qaul Sahabi* yang kemungkinan ikut mempengaruhi fatwanya pada kedua periode itu. Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, cet ke-1., hlm. 173.

²⁷ Kitab ini terdiri dari satu jilid tebal, yang memuat fatwa-fatwa Syafi'i *Qaulqadim*, namun karya *al Qadim* Syafi'i ini tidak dapat ditemukan lagi. *Ibid.* hlm. 225.

²⁸ Menurut Al Nawawi, al Karabisy adalah yang paling mashur sebagai perawi, paling teliti dan paling baik hafalnya tentang *Qaul Qadim*, selain ahli fiqh dan ilmu kalam, Ia juga mahir dalam ilmu hadist dan menulis kitab-kitab tentang *jarrah Wata'dil.* al Nawawi, *Tahzib al Asma' Wa al Luqah*, juz. III, Mesir, *Al Muhiriyah*, tt., hlm. 282

²⁹ Semula Abu Tsaur Al Kalby belajar fiqh Hanafi pada al Syaibani, tapi setelah berkenalan dengan Syafi'i Ia beralih menjadi murid dan pengikutnya yang setia, Ia juga seorang perawi hadist yang *tsiqah*. Karir fiqhnya dimulai sebagai tokoh pengajar, pembela dan pengikut Mazhab Syafi'i akan tetapi setelah mencapai tingkat keilmuan yang sempurna ia membentuk mazhab sendiri. *Ibid.* hlm. 202.

³⁰ Lahmudin Nasution, *op. cit.*, hlm. 174.

Sedangkan karya-karya Imam al-Syafi'i yang disusun setelah berdomisili di Mesir memuat fatwa-fatwa barunya yang terkenal dengan Qaul Jadid, kitab-kitab tersebut ialah al Risalah, al Umm,³¹ al Amali, al Im'la' dan lain-lain.³² kitab-kitab produk Qaul Jadid tersebut diriwayatkan oleh enam orang sahabat Imam al-Syafi'i di Mesir yaitu al Buwaithy.³³ al Harmalah. al Rabi', al Jizi Yunus Ibn Abdul A'la, al Muzani,³⁴ dan al Rabi' al Murabi'.³⁵

Disamping itu masih banyak lagi karya-karya yang disusun oleh ulama' Syafi'iyah pada generasi berikutnya yang kemudian menjadi rujukan dalam Majhab Imam al-Syafi'i. Diantaranya ialah kitab al Mukhtasar al Muzani karya Imam al Muzani, al Hawi al Kabir dan al Ahkam al Shultani'yah keduanya karya al Mawardi, al Muhazzab Fiqh al-Syafi'i karya Abu Iskhaq al Syirazi, Nihayah al

³¹ Dalam format kitab *Al Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab dengan *al Umm* diantaranya, *al Musnad* berisi *sanad* Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadist-hadist Nabi dan juga ulama'-ulama' yang menjadi gurunya. *Khilafu Malik* berisi bantahan-bantahan terhadap Imam Malik, al Radd' Ala Ibn Hasan pembelaan terhadap Mazhab Madinah dari serangan Muhammad Ibn Hasan murid Abu Hanifah dan ulama'-ulama' Irak dengan Ali Ibn Abi Thalib dan Ibn Masud, *Syair al Auza'i* berisi pembelaannya atas Imam Auza'i dari serangan Abu Yusuf, *Ikhtilaf al Hadits* berisi keterangan dan penjelasan atas hadits-hadits yang bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak secara tersendiri, *Jima' al Ilmi* berisi pembelaannya terhadap sunah Nabi, Abdul Halim al Jundi, Syafi'i Nashir *al Sunah Wa Wadhi' al Ushul* Beirut: Dar al Fikr, tt. hlm. 252-253.

³² Selain kitab-kitab yang ditulis sendiri, terdapat kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya berdasarkan pengkajian yang mereka peroleh darinyasehingga kitab itu dapat pula dianggap sebagaikarya Syafi'i seperti, *Jami' al Muzani*, *Mukhtasar al Muzani*, *Mukhtasar al Rabi'*, *Mukhtasar al Buwaithi* dan kitab *al Harmalah*. Lahmudin Nassution, *op. cit.*, hlm. 174-175.

³³ Al Buwaithi adalah murid tertua Imam al-Syafi'i yang secara langsung ditunjuk oleh beliau untuk menggantikan mengajar dimajelisnya, Ia wafat dipenjara *Baqdad* sebagai korban peristiwa *Mihnah* al-Qur'an. *Ibid*

³⁴ Ia menggantikan al Buwaithi sebagai pemimpin pengajian di Masjid Syafi'i dan merupakan tokoh terpenting dalam pengembangan Majhab Imam al-Syafi'i, Ia sangat mahir dalam melakukan *Qiyas* dan berdebat, sehingga Syafi'i menyebutnya, '*Nashir Mazhaby*' kitab *Mukhtasar* karyanya segera tersebar luas dan dijadikan sebagai kajian dan banyak disarahi oleh ulama' Syafi'iyah pada generasi selanjutnya. *Ibid*.

³⁵ Al Rabi' Al Muradi menempati posisi penting dalam meriwayatkan kitab-kitab Syafi'i, kitab *al Risalah* dan *al Umm* yang beredar sampai sekrang berasal dari riwayatnya. *Ibid*

Mathlab fi Dirayah al Majhab dan Qiyas al Umam fi Tiyas al Zhulam keduanya karya Imam al-Juwainy, al Wasith karya al Ghazali, Fath al Aziz Fisarh al Wajiz karya Imam al-Syafi'i, Adab al Qadha' karya Ibn Abi al Dam, Minhaj al Thalibin, Raudhah al Thalibin dan Majmu' Syarah al Muhazzab, ketiga kitab ini merupakan karya Imam al Nawawi.

Selain tersebut diatas masih banyak lagi kitab-kitab dan buku-buku rujukan dalam Majhab Imam al-Syafi'i, namun tidak mungkin disebutkan semuanya, Sirajudin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan sembilan puluh tujuh buah kitab fiqh Majhab Imam al-Syafi'i, namun tidak diulas satu persatu karya tersebut.³⁶

d. Corak Pemikiran Hukum Imam al-Syafi'i

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam biografinya, Imam al-Syafi'i mulai mengembangkan majhabnya sejak ia bermukim di Makkah yang kedua kalinya setelah menguasai fiqh *ahl hadis* dan *ahl ra'yi*. Disini ia mengadakan *halaqah-halaqah* ilmiah di Masjid al Haram dan mulai memperkenalkan fiqh barunya sebagai manifestasi dari pemahaman fiqh *ahl hadis* dan *ahl ra'yi*.

Selama sembilan tahun di Makkah, ia melihat pertentangan yang hebat antara aliran, terutama *ahl hadis* dan *ahl ra'yi* ditambah lagi dengan semakin bertambahnya persoalan-persoalan baru yang perlu segera diselesaikan. Keadaan yang seperti ini mendorong Imam al-

³⁶ Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

Syafi'i untuk menyusun metode istimbat (*thuruq al istimbat*) dan menyusun risalah-risalah untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Imam al-Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama hujjah yang dicetuskan di Irak. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama al Umm yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam al-Syafi'i. keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam al-Syafi'i. ketika di Irak, ia menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori Ahl al hadits.³⁷

Qaul qadim Imam al-Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh Ahl al hadits yang bersifat tradisional, tetapi fiqh yang demikian akan lebih sesuai dengan ulama' yang datang dari berbagai Negara Islam ke Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi Negara-Negara yang sebagian ulama'nya datang ke Makkah pada waktu itu berbeda –beda satu sama lain.

Pada tahun 195 H, ia kembali lagi ke Bagdad. Persinggahannya yang kedua di ibukota ini berlangsung selama dua tahun. Di tempat ini

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet-1, 1997, hlm. 125.

ia melanjutkan mengajar kepada para ulama besar dan kecil dari berbagai aliran. Dengan bekal metode istinbath yang telah disusun, langkahnya semakin mantap untuk menyebarkan pendapat-pendapatnya, sehingga tidak sedikit para ulama' yang kemudian menarik kembali pendapat yang telah dianut sebelumnya dan berganti mengikuti pendapat Imam al-Syafi'i. misalnya Abu Tsaur al kalby, disini ia juga menyusun risalah-risalah yang memuat pendapat-pendapatnya yang kemudian dikenal dengan Qaul qadim.³⁸

Sesudah itu ia kembali lagi ke Makkah untuk menunaikan haji. Tahun 198 H ia kembali lagi ke Bagdad untuk yang ketiga kalinya. Namun persinggahannya kali ini tidak berlangsung lama (hanya beberapa bulan) karena tampak pemerintahan Bani Abas dipegang oleh khalifah al Ma'mun yang cenderung berpihak pada unsur-unsur Persi dan menjadikan aliran Muta'zilah sebagai majhab resmi Negara, sementara Imam al-Syafi'i cenderung menjauhkan diri dari aliran Muta'zilah.

Berangkat dari keadaan yang seperti ini. Imam al-Syafi'i meninggalkan ibukota dan menetap di Mesir hingga akhir hayatnya (204). Kedatangan Imam al-Syafi'i disambut dengan sangat gembira oleh masyarakat dikota itu. Menurut mereka Allah SWT telah mengganti Imam mereka (al Laits Ibn sa'ad) dengan Imam baru,yaitu

³⁸ TM Hasbi Al Shidiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-1, 1973, hlm. 237. dan Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet-1, 2002, hlm. 28-29.

Imam al-Syafi'i. bahkan mereka rela menyisihkan sebagian penghasilannya dari berdagang dan menghadiahkan secara sukarela kepada Imam al-Syafi'i.³⁹

Secara geografis Mesir terletak disudut timur laut benua Afrika, dan sebagian kecil wilayahnya terletak dibenua Asia yaitu di Semenanjung Sinai, berbatasan dengan dua lautan. Dari arah utara berbatasan dengan laut tengah dan dari selatan berbatasan dengan laut merah yang dihubungkan dengan terusan Suez.⁴⁰

Posisinya yang strategis ini memudahkan terjadinya interaksi antar kebudayaan dikawasan laut tengah, khususnya budaya Yunani dan Romawi kuno yang merupakan cikal bakal dari peradaban dan kebudayaan Eropa.⁴¹

Mesir juga menjadi pusat perniagaan Negara-Negara Arab dan menjadi persimpangan jalan bagi perembesan kebudayaan barat, suatu perembesan yang tetap dalam batas-batas yang dipancarkan oleh hasrat mempertahankan sifat Islam dan Arab dalam kebudayaan Mesir.⁴²

Dari sini nampak jelas, walaupun Mesir sebagai salah satu pusat perniagaan dinegara Arab yang memungkinkan terjadinya asimilasi antar budaya, namun masyarakat Mesir tetap

³⁹ Abdullah Musthafa Al Maraqhi , *Fath Al Mubin Fi Thabaqat Al Usuliyin*, terj. Husein Muhammad, ‘*Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*’, Yogyakarta: LKPSM, cet-1, 2001, hlm. 94

⁴⁰ Riza Sihbudi, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1993, hlm. 143.

⁴¹ Ibid. hlm. 145.

⁴² K. Morgan, *Islam Jalan Lurus*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980, hlm. 272.

mempertahankan kebudayaanya yang bersifat Islam dan Arab serta memelihara tradisi –tradisi khas Mesir warisan dari tradisi Mesir kuno.

Di Mesir Imam al-Syafi'i menemukan situasi dan kondisi yang berbeda dari yang sebelumnya ia lihat dan dialaminya. Dari hasil munadharahnya dengan ulama'-ulama' Mesir yang merupakan pengikut al Laits (ahl Hadits), ia banyak menemukan hadits-hadits sharih. Disamping itu ia juga mengenal kemajuan yang membentuk karakteristik Mesir yang merupakan warisan dari bangsa qitby, Mesir kuno dan Yunani kuno.

Disamping itu, pengetahuan Imam al-Syafi'i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabanya pada tingkat awal di Irak dan Yaman. Juga menyaksikan kehidupan orang zuhud dan ahl al hadits. Pengetahuan Imam al-Syafi'i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam.

Menurut Musthafa al Siba'iy bahwa Imam al-Syafi'ilah yang meletakkan dasar pertama tentang qaidah periwayatan hadits, dan ia pula yang mempertahankan Sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Menurut Imam al-Syafi'i apabila suatu hadits sudah shahih sanadnya dan mustahil (bersambung sanadnya) kepada Nabi SAW,

maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan ahli al Madinah sebagaimana disyariatkan Imam Malik dan tidak pula perlu ditentukan syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan hadits, sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah, karena itu, Imam al-Syafi'i dijuluki sebagai *Nashir al sunnah* (penolong sunnah).⁴³

Adapun pegangan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al Qur'an Sunnah, ijma', dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam al-Syafi'i dalam kitabnya, *al Risalah* sebagai berikut:

"لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا يَقُولُ فِي شَيْءٍ: حَلٌّ وَحَرْمٌ: إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ
وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ".⁴⁴

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram, kecuali kalau ada tentang pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas".

B. Ketentuan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i

Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam masa iddah talaq *raj'i*, tidak disyaratkan adanya ridha dari isteri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut.⁴⁵

⁴³ Huzaemah Tahido Yanggo. op. cit., hlm. 124

⁴⁴ Lil Imam Muthaliby Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *Al Risalah*, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm. 25

⁴⁵ Badrun, Fiqih Muqaren, op. cit. hlm. 366.

Menurut Imam al-Syafi'i, bila seorang laki-laki berkata kepada isterinya yang sedang dalam iddah: "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam iddah, lalu wanita mengingkarinya maka yang diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuknya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukannya kemarin, dan kalau laki-laki berkata sesudah selesai iddah: "saya telah merujukmu di dalam iddah" lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuknya di masa iddah.⁴⁶

Hak merujuk bekas suami terhadap isterinya yang di talaq *raj'i*, diatur berdasarkan firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 228 sebagai berikut.

"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.."

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (perbaikan)". (Qs. Al Baqarah: 228).⁴⁷

Firman Allah tersebut memberi hak kepada bekas suami untuk merujuk bekas isterinya yang ditalaq *raj'i* dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya itu atau untuk mempermainkannya sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan.

⁴⁶ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz. V, Dar al Fikr, tt. Hlm. 263.

⁴⁷ Depag R.I. *Al qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Cv Karya Utama, 2000, hlm. 55.

Firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 231 menyatakan:

"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.."

Artinya: "Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu dekat kepada iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf (baik), atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (baik) pula. Jangan kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri". (Qs. Al Baqarah: 231)⁴⁸

Kemudian dalam majhab al-Syafi'i ia mengatakan, bahwa rujuk itu mengembalikan isteri yang sudah ditalaq *raj'i* yang masih dalam iddahnya kepada keadaan semula. Menurut mazhab al-Syafi'i, talaq *raj'i* itu mengakibatkan isteri kharam dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan isterinya.

Atas pertimbangan lebih maslahat berpisah dari pada terus merasa tersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talaq, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan lafal talaq kepada isterinya itu.

Dalam masa iddah, status wanita itu tetap sebagai isteri, ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak

⁴⁸ Ibid. hlm.56.

menerima warisan, yang tidak boleh dalam masa iddah itu ialah setempat tidur (kalau bukan untuk maksud rujuk).

Massa iddah itu, boleh dikatakan suatu masa untuk menghitung laba ruginya terhadap keluarga dalam arti yang luas, apabila perkawinan mereka akan putus. Massa iddah ialah masa berpikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talaq yang sudah terjadi itu, suami isteri mendapat pelajaran yang berharga.

Dengan i'tikad baik dan penuh kesadaran, suami melangkah kembali kepada isterinya untuk merujuk, isterinyapun dengan hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya.

Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang di idam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.⁴⁹

1. Hak Rujuk Menurut Imam al-Syafi'i

Di dalam kitab Al Umm dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas isterinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya, ungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, cet.1., hlm. 387-389.

"(قال الشافعي) رحمه الله لما جعل الله عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينها أن ليس لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لأن حاله عليها لا لها عليه ولا أمر لها في ماله دونها. فلما قال الله عز وجل "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" كان بينها أن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بالكلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما فإذا تكلم بما في العدة ثبتت له الرجعة، والكلام به أن يقول قد راجعتها أو قد ارتجعتها أو قد رددتها إلى أو قد ارتجعتها إلى فإذا تكلم بهذا فهي زوجة، ولو مات أو حرس أو ذهب عقله كانت امرأته، وإن لم يصبه من هذا شيء فقال لم أرد به رجعة فهي رجعة في الحكم إلا أن يحدث طلاقاً".⁵⁰

Artinya: "Syafi'i berkata ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya. Ketika ada firman Allah Azzawajala 'Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu' adalah menjelaskan bahwa mengembalikan itu didasari dengan perkataan atau pernyataan bukan didasari dengan perbuatan, semisal jimak dan lain-lainnya, karena hal tersebut suatu pengembalian yang didasari tanpa pernyataan terlebih dulu maka hukum rujuk bagi seorang laki-laki pada wanitanya itu tidak sah sebelum ada pernyataan keduanya itu. Ketika seorang laki-laki tiada pernyataan mengenai rujuk dalam masa iddah maka baginya sudah tetap sah contoh pernyataan 'saya mau rujuk sama kamu, atau saya telah merujuknya atau saya telah merujuknya untukku atau sungguh saya telah merujuk bagi saya. Sampai seorang laki-laki mengatakan pernyataan itu maka seorang wanita itu menjadi isterinya kembali, meskipun sesuatu itu mati atau hilang akalnya maka seorang wanita itu tetap menjadi isterinya apabila seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian dia

⁵⁰ Al-syafi'i, Al-umm. Juz.V., Op. cit. hlm. 260.

menyatakan saya tidak akan melakukan rujuk maka wanita itu tetap dihukumi rujuk kecuali terjadi perceraian”.

Begitu juga menurut fuqaha bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai gugurnya hak walaupun suami telah mentalak isterinya dengan talak *raj'i*, seperti ungkapan “saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu”. Ungkapan seperti ini merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang di syari’atkan oleh Allah SWT. Dalam kitab fiqih muqaren liakhwalusyiah Syiyyah sebagai berikut:

"الرَّجْعَةُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي عَذَةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، وَلَا يَشْتَرُطُ رِضَا الرَّجْعَةِ بِالزَّوْجَةِ، فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ الزَّوْجَةَ بِدُونِ رِضَاهَا، وَهَذَا الْحَقُّ ثَابِتٌ لِلزَّوْجِ مِنَ الشَّرْعِ، فَلَا يَمْلِكُ اسْقَاطُهُ. فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا: لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكَ. أَوْ اسْقَطْتَ حَقِّي فِي الْمَرَاةِ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِيهَا لَا يَسْقُطُ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ تَغْيِيرًا لِمَا تَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ، وَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ تَغْيِيرَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ".⁵¹

Artinya: “Rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa iddah talak *raj'i*, tidak di syartkan adanya ridha dari isteri maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut, ini adalah hak yang ditetapkan syara’ bagi suami maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalak isterinya dengan talak *raj'i*, seorang laki-laki berkata “saya tidak akan merujuk kamu, atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu”, maka hak merujuknya tetap tidak gugur karena yang demikian itu merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang di syari’atkan oleh Allah SWT. Dalam

⁵¹ Badrun, *Al fiqhu Al Muqaranu li Ahwalusyahiyyah*, op.cit. hlm. 366

firmanya; ‘‘talak yang dapat dirujuk dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, dan tidak ada seorangpun yang dapat merubah ketetapan atau ketentuan yang di syari’atkan oleh Allah SWT.

2. Istimbath Hukum Imam al-Syafi’i

seperti Majhab yang lainnya, Imam al-Syafi’i juga menentukan Thuruq al Istimbath al Ahkam tersendiri, adapun langkah-langkahnya secara hirarki ialah Asal adalah al Qur’an dan al Sunnah, beliau menempatkan al Qur’an dan al Sunnah semartabat, karena al Sunnah merupakan penjelasan dari al Qur’an, apabila tidak ditemukan dalam al Qur’an dan al Sunnah maka beliau menggunakan ijma’ fuqaha yang memiliki ilmu *khasah*,⁵² beliau juga mengambil pendapat sahabat yang telah disepakati dan juga pendapat sahabat yang masih dipertentangkan dengan mengambil salah satunya yang dianggap paling dekat dengan al Qur’an dan al Sunnah, apabila tidak ditemukan dalam al Qur’an, al Sunnah dan ijma’ beliau melakukan Qiyas terhadap al Qur’an dan al Sunnah.⁵³

Untuk lebih jelasnya Thuruq al Istimbath Imam al-Syafi’i akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

⁵² Syafi’i membagi ilmu menjadi dua bagian, pertama: ilmu *amah* yaitu ilmu yang harus diketahui oleh ummat secara umum kecuali orang gila, seperti hokum sholat lima waktu, *puasa ramadhan*, *haji zakat*, *haram zina*, *haram membunuh*, *mencuri dan minum miras*. Bagian ini diterangkan dengan tegas didalam *al Qur’an dan al Sunnah mutawatir*, ilmu ini dapat dengan mudah dapat dipelajari oleh siapa saja. Kedua: *ilmu khassah* yaitu hukum-hukum *syari’at* yang tidak dinashkan dalam *al Qur’an dan al Sunnah* atau ada *nashnya* tapi mungkin di *tak’wil*, ilmu ini hanyalah orang-orang tertentu saja yang harus mengetahuinya, karena orang yang mengetahui ilmu ini merupakan orang yang menguasai ilmu *al Kitab dan al Sunnah*, mengetahui *Aqwal al Sahabat* dan mengetahui pendapat-pendapat ulama’, orang yang menguasai ilmu inilah yang memegang otoritas untuk *ijtihad*. TM Hasbi As Sidiqi, *op. cit.*, hlm. 12.

⁵³ Al-Syafi’i *Al Umm*, juz VII, *op. cit.*, hlm. 246.

a. Al Qur'an

Imam al-syafi'i menegaskan bahwa al Kitab atau al Qur'an merupakan pembawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam al Qur'an adalah *hujjah* (dalil, argumen) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang erat kaitanya dengan pengetahuannya tentang isi al Qur'an. Setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk mengetahui ilmu al Qur'an baik yang diperoleh dari *nash* (penegasan ungkapan) maupun melalui *istinbath* (penggalian hukum). Menurutnya setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam al Qur'an.⁵⁴

Imam al-Syafi'i memandang al Qur'an dan al Sunnah berada dalam satu tingkatan, keduanya merupakan sumber pokok hukum Islam, sumber-sumber yang lain harus didasarkan pada keduanya. al Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al Qur'an, namun tidak memberikan pengertian bahwa semua al Sunnah yang diriwayatkan dari Nabi mempunyai faidah yakin, oleh karena itu apabila ada al Sunnah yang menyalahi al Qur'an hendaklah al Qur'an yang didahulukan.

Menurutnya seluruh al Qur'an itu terdiri dari bahasa Arab, tidak terdapat satu katapun didalamnya yang berbahasa Arab. Sejalan dengan itu ia menegaskan bahwa setiap umat Islam diharuskan

⁵⁴ Muhammad Ibn Idris Al syafi'i, *Al Risalah*. Beriut: Dar Al Fikr, tt, hlm. 17-20.

mempelajari bahasa Arab sedapat mungkin, sehingga ia dapat mengucapkan *syahadah*, membaca al Qur'an dan berdhikir yang wajib seperti takbir atau yang diperintahkan seperti *tasbih*, *tasyahud* dan sebagainya. Ini merupakan *ferdhu 'ain* yang berlaku secara umum, sedangkan penguasaan bahasa Arab secara mendalam diwajibkan secara terbatas (*fardhu kifayah*) atas para ulama'.⁵⁵

Imam al-Syafi'i menekankan pentingnya penguasaan itu karena tidak seorangpun yang dapat menjelaskan kandungan al Qur'an tanpa menguasai bahasa Arab karena bahasa tersebut terkenal dengan keluasannya. Hal ini dapat dilihat misalnya, penggunaan lafadh '*amm* (ungkapan yang bersifat umum). Pada sebagiannya dapat dipastikan bahwa lafadh '*amm* itu dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian umum, tetapi pada penggunaan lainnya ia mengandung kemungkinan *tahsis* (pembatasan pada cakupannya). Selain itu pada lafadh '*amm* pula yang digunakan untuk pengertian khusus, baik yang diketahui secara jelas maupun yang diperoleh melalui petunjuk susunan redaksinya (*siyaq*).⁵⁶

b. Al Sunnah

Dengan pendidikan yang diperolehnya dari kalangan *Ahl al Hadits*, Imam al-Syafi'i sangat kuat berpegang pada hadits sebagai dalil hukum. Sikap pendirian dan pandangannya terhadap Sunnah dinyatakan dengan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Dengan berbagai argumentasi,

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 42-49.

⁵⁶ Lahmudin Nasution, *op.cit.*, hlm.66

ia mendukung *kehujjahan* sunnah, sehingga ia mendapatkan gelar *Nashir al Sunnah* (pembela sunnah) ketika berada di Bagdad.⁵⁷

Sunnah menurutnya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara murni yang meliputi perkataan, perbuatan atau *taqrir* (ketetapan), ia selalu memilih antara Sunnah Nabi dengan perkataan, pendapat atau putusan para sahabat atau yang lainnya. Ia juga banyak menekankan bahwa *hujjah* yang wajib diikuti umat adalah *Khabar* yang berasal dari Rasulullah SAW bukan yang lainnya. Pernyataan ini mengandung konsekuensi logis untuk mengadakan penelitian secara sistematis dengan tolak ukur tertentu sehingga segala hal yang disandarkan kepada Nabi tidak bisa lepas begitu saja dari kritik pembuktian keotentikannya.⁵⁸

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa Sunnah merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan al Kitab, ia meletakkan Sunnah dalam satu peringkat dengan al Kitab. Ini menunjukkan derajat al Sunnah secara keseluruhan, bukan satuan dimana penggunaannya sebagai dalil, dan hukum penolakan terhadapnya sama dengan al Kitab. Untuk mendukung pendapatnya ia mengajukan beberapa dalil, ia mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia mentaati Rasulullah SAW.⁵⁹

Pada beberapa ayat perintah itu disebutkan bersamaan dengan perintah mentaati Allah (misalnya Qs. Al Nisa': 59) dan sebagiannya

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 73

⁵⁸ M. Alfatih Suuryadilaga, (ed), *Setudi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm.287.

⁵⁹ Al Syafi'i, *Al Risalah*, op. cit., hlm.79-85.

dikemukakan terpisah (Qs. Al Nisa': 65). Selain itu ada ayat yang menyatakan bahwa taat kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya adalah adalah taat kepada Allah SWT (Qs. Al Fath: 10). Sehingga jelaslah bahwa menerima petunjuk Rasulullah SAW berarti menerimanya dari Allah SWT.⁶⁰ Menurut kata *al hikmah* yang beberapa kali disebutkan bersamaan dengan *al Kitab* (Qs. Al Nisa': 113) tidak mungkin ditafsirkan kecuali dengan *al Sunnah*.⁶¹

Secara umum, *Sunnah* adalah penjelas bagi *al Qur'an*. Oleh karena itu ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi *al Qur'an*. bila *al Qur'an* telah mengatur hukum secara nash, maka *Sunnah* pun akan berbuat demikian. Jika *al Qur'an* memberikan aturan secara global, maka *Sunnah* akan memberikan penjelasan tentang maksudnya. Kemudian penjelasan *Sunnah* tidak mungkin keluar dari lingkup *alternative* yang diberikan oleh *al Qur'an*.⁶²

Dalam rincian lebih lanjut tentang hubungan *Sunnah* dengan *al Qur'an*, Imam al-Syafi'i mengemukakan bahwa fungsi *Sunnah* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai turutan bagi hukum yang telah diatur dalam *al Qur'an*.
2. Sebagai penjelas berupa rincian atau batasan-batasan atas hukum *al Qur'an*.

⁶⁰ Al Syafi'i, *Al Umm*, juz VII, op. cit., hlm. 301.

⁶¹ Penafsiran ini dikaitkan dengan beberapa ayat yang menyebutkan kata '*al hikmah*' bersama '*al Kitab*', secara bersama-sama, iman kepada Allah dengan iman kepada Rasulnya, kewajiban taat kepada rasul, serta fungsi *sunnah* sebagai penjelas bagi *al Kitab*. Al Syafi'i, *Al Risalah*, op. cit., hlm. 78.

⁶² Al Syafi'i, *al Umm*, juz VIII, op. cit., hlm. 623.

3. Sebagai tambahan dalam arti mengatur hukum yang tidak diatur dalam nash al Qur'an.⁶³

Imam al-Syafi'i membagi al Sunnah atau al Hadits menjadi dua macam yaitu, *Khabar 'Ammah* (hadits mutawattir) dan *Khabar Khassah* (hadits ahad). Selanjutnya ia memandang kebenaran hadits *mutawattir* itu pasti sehingga hadits tersebut mutlak harus diterima sebagai dalil akan tetapi hadits *ahad* hanya wajib diamalkan apabila hadits itu sahih. Kesahihan suatu hadits dapat diketahui melalui penelitian dengan menggunakan kriteria tertentu.

Pada pokoknya, persyaratan yang ditetapkan oleh Imam al-Syafi'i agar suatu hadits dapat diamalkan sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli hadits dan ushul fiqh pada masa kemudian yang menyangkut *tsiqah* ('adallah dan dhabit) yang harus terpenuhi pada setiap perawi dan kesinambungan *sanad* yang meriwayatkannya, serta tidak adanya cacat atau kelainan dalam hadits tersebut.⁶⁴

Mengenai hadits *ahad* (hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja) al Syafi'i menerangkan, 'maka saya katakan, *khabar* yang diriwayatkan oleh seorang dari seorang sehingga sampai kepada Nabi SAW atau kepada sumber pertama tersebut.'⁶⁵

Menurut Imam al-Syafi'i suatu hadits yang diriwayatkan secara bersambung melalui *sanad* yang terpercaya haruslah diterima sebagai

⁶³ Al Syafi'i, *al Risalah, op. cit.*, hlm. 22.

⁶⁴ Mengenai persyaratan suatu hadits, secara rinci dapat dilihat pada al Syafi'i, *al Risalah*, hlm.370-372.

⁶⁵ *Ibid.*

hujjah meskipun hanya diriwayatkan oleh seorang (hadits *ahad*). Keterpercayaan dan kesinambungan *sanad* sudah cukup menjadi dasar tanpa harus terkait dengan jumlah perawinya. Dari sini jelas bahwa Imam al-Syafi'i berpendapat, hadits *ahad* wajib diamalkan sebagai *hujjah* yang berkekuatan mengikat dan berdiri sendiri.⁶⁶

Mengenai hadits *mursal* (hadits yang dalam periwayatannya tidak tersebut nama sahabat yang menerimanya dari Rasulullah SAW), pada prinsipnya Imam al-Syafi'i tidak menerima hadits *mursal* sebagai *hujjah*, sebagaimana yang disimpulkan dari dialaog Imam al-Syafi'i dalam al-Risalah kecuali mendapatkan dukungan dari luar berupa:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh perawi lain secara *isnad*.
2. Hadits *mursal* dari sumber yang lain.
3. Qaul sahabi.
4. Pendapat kebanyakan ulama'.
5. Kebiasaan perawi tidak meriwayatkan hadits dari sumber yang cacat, karena *majhul* atau sifat lainnya, dan riwayatnya selalu sama atau lebih baik dari pada riwayat *hufadz* yang lain.⁶⁷

c. Al Ijma'

Imam al-Syafi'i tidak merumuskan pengertian *ijma'* secara definisi, namun dari berbagai uraiannya dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya *ijma'* adalah kesepakatan para ulama' (*ahl ilmi*)⁶⁸ tentang suatu hukum syari'ah. Kesepakatan disini haruslah merupakan kesatuan pendapat dari seluruh fuqaha' yang hidup pada suatu masa tanpa membedakan lingkungan, kelompok atau generasi tertentu. Dengan demikian rumusan Imam al-Syafi'i berbeda dengan rumusan Imam Malik yang menganggap kesepakatan penduduk Madinnah sebagai *ijma'*

⁶⁶ Al-Syafi'i, *al-Umm*, juz VIII, *op. cit.*, hlm. 591. lihat juga Lahmudin Nasution, *op. cit.*, hlm. 81.

⁶⁷ Al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hlm. 464.

⁶⁸ *Ahl Ilmi* yang dimaksudkannya ialah para ulama' yang dianggap sebagai faqih dan fatwa serta keputusannya diterima oleh penduduk di suatu negeri. Al-Syafi'i, *al-Umm*, juz VII, *op. cit.*, hlm. 293.

dan rumusan kaum Zhahiriyyah yang membatasinya hanya pada kesepakatan para sahabat.

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa *ijma'* merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara luas pada semua bidang. "*ijma'* adalah *hujjah* atas segala sesuatunya karena *ijma'* itu tidak mungkin salah."

⁶⁹ Untuk menegaskan *kehujjahan* *ijma'*, ia mengemukakan dalil-dalil naqli yang diambil dari Qs. Al Nisa' ayat 115 dan hadits yang diriwayatkan ibn Mas'ud dan Umar Ibn Khattab yang menerangkan tentang perintah agar tetap bersama jama'ah umat Islam.

Menurutnya satu-satunya penafsiran yang benar bagi perintah itu adalah kesamaan pendirian dalam masalah halal dan haram bukan kebersamaan secara fisik. Jadi siapa yang berpandangan sama dengan umat, itulah dianggap jama'ah sesuai dengan perintah tersebut. Kelalaian hanya mungkin terjadi dalam perpecahan, sedangkan jama'ah secara keseluruhan tidak mungkin melalaikan makna kitab, sunnah dan qiyas.⁷⁰

Imam al-Syafi'i menempatkan *ijma'* pada urutan ketiga, setelah al Kitab dan al Sunnah. Namun ia mendahulukan hadits *ahad* atas *ijma'* yang disendikan *ijtihad*, kecuali ada keterangan bahwa *ijma'* disendikan *naql* dan diriwayatkan secara *mutawattir* hingga sampai kepada Rasulullah SAW.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Al Syafi'i, *al Risalah, op. cit.*, hlm. 401-402.

⁷¹ TM Hasbi Ash Siddiqi, *op. cit.*, hlm. 28.

d. Al Qiyas

Imam al-Syafi'i telah menegaskan beberapa pokok pikirannya tentang qiyas adalah sebagai berikut,

1. Bahwa setiap kasus yang terjadi atas orang muslim pasti ada hukumnya, walaupun hukum itu tidak dinyatakan secara tegas pasti ada petunjuk kearahnya, dan hukum itu dapat dicari dengan ijtihad yaitu qiyas.
2. Bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui qiyas itu adalah benar secara dhahir dan hanya berlaku bagi orang yang menemukannya, tidak bagi semua ulama', sebab hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang ghaib.
3. Qiyas itu ada dua tingkatan. Pertama, sesuatu yang diqiyaskan itu tercakup oleh pengertian *ashl* (kasus pokok) sehingga tidak akan ada perbedaan dalam mengqiyaskan. Kedua, sesuatu itu mempunyai kesamaan dengan beberapa *ashl*, dalam hal ini ia harus diqiyaskan kepada *ashl* yang paling mirip dengannya.
4. Hukum masalah yang tidak ada nashnya harus dicari dengan qiyas, namun kita dibebani dengan apa yang kita anggap benar (*Al haq 'Indana*) dan kebenaran itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kekuatan tunjukan dalil-dalinya.
5. Jika terjadi perbedaan pendapat, para mujtahid harus mengamalkan hasil ijtihadnya masing-masing sebab pada lahirnya itulah yang benar baginya, walaupun pada hakikatnya dua pendapat yang berbeda tentang sesuatu tidaklah mungkin sama-sama benar.
6. Sekalipun dalam keadaan tidak mampu mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, orang tetap tidak boleh bertindak hanya berdasarkan *Ra'yu* semata-mata tanpa didasari dalil.⁷²

Qiyas merupakan upaya menemukan sesuatu yang dicari melalui dalil-dalil sesuai dengan khabar yang ada pada al Kitab dan al Sunnah, ijtihad adalah mencari sesuatu yang telah ada tapi tidak tampak (*'ain qa'imah mughayyah*) sehingga untuk menemukannya diperlukan petunjuk dalil-dalil atau upaya mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang ada. Imam al-Syafi'i menegaskan dua kata, ijtihad dan qiyas itu adalah dua nama satu makna (*ismani li ma'na wahid*).⁷³

⁷²Al Syafi'i, *al Risalah*, op. cit., hlm. 477-502.

⁷³*Ibid*, hlm. 504&477.

Pada prinsipnya, Imam al-Syafi'i memandang bahwa qiyas berlaku secara umum pada semua bidang hukum yang *'illahnya* dapat diketahui selain ruang lingkup ibadah, karena ibadah telah cukup sempurna dari al Qur'an dan al Sunnah.⁷⁴ Dan dalam tataran aplikasi terdapat beberapa kasus yang hukumnya telah ditetapkan dengan nash didukung oleh alasan tertentu dengan jelas, namun mengingat kedudukannya sebagai pengecualian atau penyimpangan, maka qiyas tidak diberlakukan kepadanya. Seperti *hudud, taqdirat dan rukhsah*. Dalam al Risalah Imam al-Syafi'i mengatakan:

“kasus yang hukumnya ditetapkan Allah dengan nash tetapi kemudian Rasulullah memberikan rukhsah pada bagian-bagian tertentu darinya, maka rukhsah tersebut hanya berlaku sebatas yang beliau tetapkan itu dan bagian lain tidak dapat diqiyaskan kepadanya. Demikian pula bila Rasulullah SAW sendiri menetapkan suatu hukum secara umum, tetapi ia kemudian menetapkan Sunnah yang menyimpang darinya.”⁷⁵

e. Al Aqwal Al Sahaby

Al Aqwal al Sahaby atau yang sering disebut dengan Qaul Sahabat ialah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nash, baik Kitab maupun Sunnah.

Tentang Qaul Sahabat, Imam al-Syafi'i membaginya menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Pendapat sahabat yang memperoleh kesepakatan (ijma') dikalangan mereka. Pendapat yang seperti ini mempunyai kekuatan mengikat dan harus dijalankan sebagai hujjah.
2. Pendapat sahabat yang beragam dan tidak mencapai kesepakatan tentang pendapat yang seperti ini harus dilakukan tarjih dengan mempedomani dalil-dalil dan yang harus diambil adalah pendapat yang sesuai dengan Al Kitab, Al Sunnah, Ijma' atau didukung oleh qiyas yang lebih shahih.

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Majhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV, 2002, hlm. 212..

⁷⁵ Al Syafi'i, *Al Risalah*, *op. cit.*, hlm.545.

3. Pendapat yang dikeluarkan oleh seorang sahabat saja tanpa dukungan ataupun bantahan dari sahabat lain.⁷⁶

Qaul sahabat yang tidak termasuk lapangan ijtihad adalah qaul yang disepakati (ijma') dikalangan mereka. Maka qaul seperti ini harus dijadikan *hujjah* dan tidak memerlukan adanya sandaran ijma' atau adanya nash. Sedangkan qaul sahabat yang merupakan lapangan ijtihad adalah qaul yang beragam tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini Imam al-Syafi'i memilih salah satunya. Misalnya dalam masalah *radd* Imam al-Syafi'i mengambil pendapat sahabat Zaid Ibn Tsabit dan masalah *mirats jad* (warisan kakek) bersama saudara baik sekandung ataupun bukan, ia mengambil pendapat yang menjadikan kakek sebagai penghalang saudara.⁷⁷

⁷⁶ Al Syafi'i, *Al Risalah, op. cit.*, hlm.597.

⁷⁷ TM Hasbi Ash Shiddiqi, *op. cit.*, hlm. 43.

BAB IV
KETENTUAN RUJUK DALAM KHI
(KOMPILASI HUKUM ISLAM)

A. Sekilas Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran kepala biro Peradilan Agama Nomer B/1/735 tanggal 18 pebruari 1958 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah diluar pulau jawa dan Madura menunjukan salah satu bukti tentang hal tersebut.¹

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri, karena itu ia mempunyai titik awal dan titik akhir yang berimpit denganya.²

Didalam kerangka ini Kompilasi Hukum Islam sebagai yang termuat dalam Inpres Nomer 1 Tahun 1991 adalah salah satu bentuk terakhir dalam rekaman sejarah yang belum berakhir.³

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut ‘‘Kompilasi Hukum Islam’’ ada baiknya dijelaskan terlebih

¹. Dirijen Binbaga Islam, *sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 1997/1998, hlm. 119.

². *Ibid*

³. *Ibid*

dahulu secara khusus bagaimana pengertian ‘‘Kompilasi’’ itu sendiri. Karena istilah tersebut kurang populer di gunakan dalam pergaulan sehari-hari.⁴

Bilamana kita membuka kamus-kamus dan *ensiklopedi* Indonesia kita tidak menemukan istilah ‘‘Kompilasi’’ di dalamnya yang berarti hingga sekarang ia masih belum diterima secara meluas dalam bahasa Indonesia. Begitu pula dalam buku-buku hukum berbahasa Indonesia, yang ditemukan uraian tentang apa itu Kompilasi, bagaimana kedudukannya, dasar keabsahannya dan sebagainya.⁵

Dalam kajian hukum, kita hanya mengenal istilah ‘‘Kodifikasi’’ yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Dalam praktek kodifikasi yang demikian di terjemahkan dengan istilah ‘‘kitab undang-undang’’ (*wetboek*) yang di bedakan dengan ‘‘undang-undang’’ (*wet*) seperti kitab undang-undang hukum pidana (*wetboek van strafrecht*), kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*), kitab undang-undang hukum dagang (*wetboek van koophandel*) dan lain-lain. Selain itu, kita masih mengenal adanya undang-undang agraria, undang-undang Perkawinan, undang-undang lingkungan hidup yang hanya disebut sebagai undang-undang saja. Apa yang disebutkan terakhir biasanya hanya mencakup salah satu sektor saja dari hukum, sedangkan kodifikasi meliputi bidang yang luas karena dapat menyangkut bidang hukum perdata secara keseluruhan, bidang hukum pidana dan bidang hukum dagang yang sudah barang tentu materinya lebih banyak dari pada hanya sekedar sebuah undang-undang biasa.⁶

Baik kitab undang-undang maupun undang-undang saja pembentukannya ditetapkan secara resmi melalui suatu prosedur yang bersifat khusus. Istilah ‘‘*wet*’’ atau ‘‘*wetboek*’’ selain bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan undang-undang atau kitab undang-undang selalu

⁴. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, cet-1., 1992, hlm. 9.

⁵. *ibid*

⁶. *Ibid.* hlm. 10.

mengacu pada bentuk formal yang sudah tertentu pada peringkat tertentu dalam tingkatan peraturan perundang-undangan di Negara kita.

Sebagaimana halnya dengan kodifikasi yang istilahnya dari perkataan bahasa latin, maka istilah kompilasi pun diambil dari bahasa yang sama. Istilah "kompilasi" diambil dari perkataan "*compilare*" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian di kembangkan menjadi "*compilation*" dalam bahasa inggris atau "*compilatie*" dalam bahasa Belanda istilah ini kemudian di pergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "kompilasi" yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.⁷

Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah di ketahui bahwa di tinjau dari sudut bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang di ambil dari berbagai buku / tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang di buat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk di tulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang di perlukan dapat di temukan dengan mudah.⁸

Sedangkan menurut hukum kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁹

Adapun hukum Islam adalah terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau *assyari'ah al-Islamy*, akan tetapi penekanannya kepada *al-fiqh al-Islamy*. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam di pahami sebagai penggabungan dua kata, yaitu hukum dan Islam, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya, kemudian kata hukum disandarkan kepada kata

⁷. *Ibid.* hlm. 10.

⁸. *Ibid.* hlm. 11.

⁹. *Ibid.* hlm. 12.

Islam.¹⁰ Dengan demikian dapat di pahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan di yakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹¹

Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan kompilasi hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontra fersial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusunan kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang di buatnya tersebut, namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dari pihak manapun.¹²

Bahan-bahan dimaksud di angkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang di artikan dengan kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang di tulis oleh para ulama' fiqih yang biasa di pergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan di kembangkan serta dihipunkan kedalam satu himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.¹³

Di Indonesia berlaku tiga system hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Kedudukannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam itu sendiri, kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaanya masing-masing

¹⁰. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cet-6.,2003, hlm. 7.

¹¹. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, cet-2., 1993, hlm.18.

¹². Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 13.

¹³. *Ibid.* hlm. 14.

kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad 13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama kemudian di ikuti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan beberapa kerajaan lainnya.¹⁴

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam, dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang di kenal dengan *compendium freijer*. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar. Pada penjajahan Belanda mula-mula hukum Islam, dengan bertumpu pada pikiran *Sholten Van Oud Haarlem*, diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah "*Godsaienstige Wetten*" sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat (2) *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang bumi putera, atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim Agama atau kepala masyarakat, mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang Agama atau ketentuan mereka.¹⁵

Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan bidang kewarisan dari kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkan Stbl 1937 Nomer 116 namun *befacto* hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan di antara mereka melalui Pengadilan Agama.¹⁶

Secara yuridis formal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi kemerdekaannya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui sebagai

¹⁴. Dirjen Binbaga Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 121.

¹⁵. *Ibid.* hlm. 121-122.

¹⁶. *Ibid.* hlm. 122.

berlakunya UUD 1945. betapapun juga, berbicara hukum Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari eksistensi Negara Indonesia itu sendiri.¹⁷

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama, cenderung simpang siur di sebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama' dalam hampir setiap persoalan, di samping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqh yang di pandang sebagai hukum yang harus diperlakukan, bukan sebagai pendapat (doktrin fatwa) ulama' yang di jadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.¹⁸

Barangkali tidak berlebihan untuk menyatakan adanya kerancuan pemahaman dan penghayatan masyarakat Islam Indonesia selama ini. Kerancuan ini tidak terbatas pada masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan ulama' dan lingkungan pendidikan serta perguruan tinggi Islam. Mereka selalu mengidentikan fiqh dengan syari'ah atau "hukum Islam" pengidentikan fiqh dengan hukum Islam, telah melahirkan kekeliruan penerapan yang sangat keterlaluan. Dalam menghadapi penyelesaian kasus perkara di lingkungan Peradilan Agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh, rujukan utama mereka lari kepada kitab-kitab fiqh para mazhab.¹⁹

Akibat dan sikap perilaku para hakim yang mengidentikan fiqh dengan syari'ah atau hukum Islam, lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan latar belakang mazhabnya yang dianut

¹⁷. Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 35.

¹⁸. Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)* Jakarta: Radar Jaya, cet-2., 2002, hlm. 144.

¹⁹. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-2., 2003, hlm. 19.

dan digandrungi masing-masing hakim. Putusan-putusan Peradilan Agama yang sangat “*berdisparatis*” antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Jika hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan gandrung dan berlatar belakang pengikut mazhab Hambali, dalil dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai paham ajaran Hambali. Sebaliknya apabila hakim yang mengadili berlatar belakang mazhab Al-syafi’i, putusan yang di jatuhkan sangat dipengaruhi kepada landasan doktrin Imam Al-syafi’i.²⁰

Produk pemikiran hukum Islam berupa keputusan Pengadilan Agama. Keputusan Pengadilan Agama bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Meskipun sebagai produk lembaga yudikatif, keputusan Pengadilan dapat bernilai sebagai yurisprudensi, yang dalam kasus –kasus yang sama, dapat di jadikan sebagai referensi hukum sampai tingkat tertentu, akan halnya produk pemikiran hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan, bersifat mengikat dan bahkan daya ikatnya lebih luas, dinamikanya agak lamban, karena sebagai peraturan organik, kadang-kadang tidak cukup elastis untuk mengantisipasi tuntutan waktu dan perubahan. Dengan mengambil contoh undang-undang perkawinan misalnya, yang di dalamnya terdapat muatan-muatan hukum Islamnya, ia mengikat semua warga masyarakat Indonesia.²¹

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Undang-undang nomer 22 tahun 1946 dan undang-undang nomer 32 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talaq dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat *propensialistis* dan tidak sesuai dengan Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan.²²

Pada saat itulah juga terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam kearah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan undang-undang nomer 22 1946 dijelaskan pula bahwa pada saat itu hukum

²⁰. *Ibid.*

²¹. Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 33.

²². Dirijen Binbaga Islam, *op. cit.*, hlm. 123.

perkawinan, talaq dan rujuk (umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talaq dan rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teku Mohammad Hasan.²³

Sejak perumusan dasar Negara pada saat BPUPKI bersidang, disahkannya piagam Jakarta pada tanggal 22 juni 1945, yang kemudian disepakati direvisi menjadi rumusan final pada sila pertama pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dijabarkan dalam pasal 29 batang tubuh undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: (1) Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut Agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, membicarakan hukum Islam di Indonesia bisa tidak ada kaitanya dengan sejarah Peradilan Agama di Indonesia, lembaga inilah yang secara formal merupakan wadah penyelesaian atau pelaksanaan hukum Islam, sebagai kelanjutan pengadilan serambi atau pengadilan masjid dimasa-masa kesultanan dahulu, karena hukum materiel yang menjadi kompetensi absolutnya adalah hukum Islam.²⁴

Pada tahun 1970 dikeluarkan undang-undang nomer 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat (1) menyatakan: penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, selanjutnya dalam pasal 10 dinyatakan: kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tatausaha Negara.²⁵

Gagasan untuk mengadakan kompilasi hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia

²³. *Ibid.*

²⁴. Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 35-36.

²⁵. *Ibid.* hlm. 37.

Munawir Sadzali. M.A. pada bulan pebruari tahun 1985 dalam ceramahnya didepan para mahasiswa IAIN sunan ampel Surabaya, semenjak itu ide ini mengalir dan dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.²⁶

Kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan Departemen Agama. Rintisan upaya pembentukan kompilasi itu sudah nampak, terutama sejak dikeluarkannya edaran biro peradilan Agama nomer B / 1 / 735 tanggal 18 february 1958 sebagai pelaksanaan PP nomer 1945 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah diluar jawa dan madura. Dalam surat edaran tersebut (huruf B) dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dianjurkan menggunakan 13 kitab sebagai pedoman yang telah ditentukan.²⁷

Jadi lahirnya kompilasi hukum Islam di Indonesia, merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim dilingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Dengan adanya kompilasi hukum Islam tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu pada kompilasi hukum Islam tersebut.²⁸

Landasan yuridis lahirnya Kompilasi hukum Islam kembali kepada rumusan, tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana di isyaratkan oleh pasal 27 ayat (1) undang-undang nomer 14 tahun 1970 yang berbunyi: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" di satu sisi hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, menurut *qaidah* fiqih, bahwa: "hukum Islam dapat berubah karena

²⁶. Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 31.

²⁷. Kitab- kitab tersebut yaitu: 1. *al-bajuri*, 2. *fat-hul muin*, 3. *syarkowi al-attahrir*, 4. *qalyubi/mahalli*, 5. *fathul wahhab dengan syarahnya*, 6. *tuhfah*, 7. *targhibul musytaq*, 8. *qawwqin syar'iyah lis syayid bin yahya*, 9. *qawanin syar'iyah lis sayyid sadaqah dachlan*, 10. *syamsuri fil faraidi*, 11. *buhyatul musytarsyidin*, 12. *al fiq alaa madzahibil arba'ah*, 13. *muqnnil muhtaj*. Lihat dirjen binbaga Islam, *op. cit.*, hlm. 124.

²⁸. Suparman Usman, *op. cit.*, hlm. 147.

perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Dengan demikian penggalian dan perumusan hukum materiel Islam menuju kepada penyempurnaannya, merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa di hindari.²⁹

Gagasan untuk melakukan Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah dua setengah tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim Agama baik di tingkat nasional maupun regional.

Sedangkan pada tanggal 16 oktober 1985 para alim ulama’ sejawat menyatakan bahwa dalam rapat-rapat gabungan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama telah di peroleh kesimpulan bahwa kesempurnaan pembinaan badan-badan Peradilan Agama beserta aparatnya hanya dapat di capai antara lain dengan:

- a. Memberikan dasar formal yaitu: kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan Peradilan Agama dan kepastian hukum (legal security) di bidang hukum materiel.
- b. Demi tercapainya *legal security* bagi para hakim, bagi para *justiabelan* (orang awam pencari keadilan) maupun bagi masyarakat Islam sendiri perlu aturan-aturan hukum Islam yang tersebar itu dihimpun atau di kompilasi dalam buku-buku hukum tentang *munaqakhat* (perkawinan), *faraid* (kewarisan) dan waqaf.³⁰

Ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam ini memang baru muncul sekitar tahun 1985, dan kemunculannya ini adalah merupakan hasil kompromi antara pihak Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Langkah untuk mewujudkan kegiatan ini mendapat dukungan banyak pihak. Menurut Prof. Ismail Suny, pada bulan maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan

²⁹. *Ibid*

³⁰. Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 32.

Bersama) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam.³¹

Rancangan Kompilasi Hukum Islam ini selesai di susun dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan, untuk itu pada tanggal 29 desember 1987 secara resmi naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam oleh pimpinan proyek pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara penyerahan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam di lakukan penandatanganan surat keputusan bersama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia “H. Ali Said. S.H.” dan Menteri Agama Republik Indonesia “H. Munawir Syadzali. M.A.” tentang pelaksanaan lokakarya pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi pada bulan februari 1988 lokakarya tersebut di laksanakan pada tanggal 2 sampai 6 februari 1988 dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama’ dan cendikiawan muslim.³²

1. Tujuan Kompilasi

Seperti yang sudah di katakan tema utama kompilasi ialah “mempositifkan hukum Islam di Indonesia”. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum ada beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai.

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama.

Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Busthanul Arifin .S.H. dalam kapasitasnya sebagai ketua muda Mahkamah Agung urusan lingkungan Peradilan Agama berulang kali beliau mengatakan dalam berbagai kesempatan, bahwa ada “tiga pilar” soko guru Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi Peradilan yang di amanatkan pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 10 UU nomer 14 tahun 1970. salah satu pilar tidak di penuhi menyebabkan penyelenggaraan fungsi Peradilan tidak benar jalanya.³³

1). Adanya badan Peradilan yang terorganisasi berdasar kekuasaan undang-undang.

Tentang hal ini lingkungan Peradilan Agama secara legalistis berdasar pasal 10 UU NO. 14 tahun 1970, telah diakui secara resmi

³¹. *Ibid.* hlm. 33.

³². Binbaga Agama Islam, *op. cit.*, hlm.142-143.

³³. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 23.

sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam Negara hukum R.I. lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 tahun 1989.

Dengan demikian, Pengadilan Agama, resmi mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Negara yang berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Hal itu sudah ditegaskan dalam pasal 1 UU No. 14 tahun 1985 jo. Pasal 3. UU No.7 tahun 1989. Peradilan Agama bukan Peradilan swasta, tetapi berkedudukan sebagai Peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.³⁴

2). Adanya organ pelaksana.

Pilar kedua, adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya Peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan surat yang di alaminya dalam perjalanan sejarah. Dimasa yang lalu organnya barangkali belum sempurna. Tingkat kualitas, integritas profesionalisme belum memenuhi standard. Namun dalam perjalanan sejarah kehadirannya, sesuai dengan tekad pembinaan dan pengawasan yang di perlihatkan Departemen Agama dan Mahkamah Agung, kualitas integritas profesionalisme yang di miliki organ aparat, dari kehari semakin solid.³⁵

3). Adanya sarana hukum sebagai rujukan.

Pilar ketiga adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi, sepanjang mengenai landasan kedudukan, kewenangan telah di kodifikasi aturan hukumnya. Dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989, sudah mantab kedudukan dan kewenangannya. Begitu juga mengenai hukum acara, sudah positif dan unifikatif. Berdasar pasal 50 UU No.7 tahun 1989, hukum acara yang di terapkan, di samakan dengan hukum yang berlaku untuk Peradilan umum yakni HIR dan RBG, di tambah dengan ketentuan hukum acara yang di atur dalam PP No. 9 tahun 1975, plus dengan yang di atur sendiri dalam UU No. 7 tahun 1989, sebagai aturan hukum acara khusus mengenai pemeriksaan perkara cerai talaq dan gugat cerai.³⁶

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum.

Dengan lahirnya KHI, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan di paksakan nilai-nilainya

³⁴. *Ibid.*

³⁵. *Ibid.* hlm. 24.

³⁶. *Ibid.*

bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama.³⁷

c. Mempercepat proses *taqribil bainal ummah*.

Tujuan lain yang tidak kurang pentingnya ialah mempercepat arus proses *taqribi bainal ummah*. Dengan adanya kompilasi, dapat diharapkan sebagai jembatan penyebrang kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan “*khilafiyah*”. Sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat dipadu dan di satukan pemahaman yang sama.³⁸

d. Menyingkirkan paham *privat affair*.

Hal lain yang dituju kompilasi, menyingkirkan paham dan cakrawala *privat affair*. Dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selama ini, nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap merupakan “urusan pribadi”. Tindakan perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan semata-mata dianggap urusan hubungan fertikal seseorang dengan Allah, tidak perlu campur tangan orang lain.

Paham yang bercorak *private affair* ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam. Tetapi meliputi kalangan elit lingkungan ulama’ dan fuqaha. Dari hasil berbagai pertemuan dengan kalangan ulama’ di seluruh Indonesia pada waktu menjajaki pengumpulan materi kompilasi, sangat lantang di suarakan sebgaiian besar ulama’ dan fuqaha, bahwa urusan kawin cerai dan poligami adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada hak penguasa (*umara’*) untuk mengatur dan mencampuri. Tidak perlu penertiban, persyaratan tambahan maupun tindakan admistratif.³⁹

2. Kompilasi Merupakan Jalan Pintas.

Terjadinya di sparitas putusan-putusan Pengadilan Agama terjadi penyelenggaraan fungsi Peradilan yang sewenang-wenang, dalam pergaulan pertarungan penerapan kitab-kitab fiqih. Kosongnya kitab hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif, kehadiran dan keberadaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman belum memenuhi persyaratan. Pilarnya masih pincang karena belum di topang oleh kitab hukum yang resmi secara otoritatif.⁴⁰

³⁷. *Ibid.*, hlm. 25.

³⁸. *Ibid.*, hlm. 26.

³⁹. *Ibid.*, hlm. 27

⁴⁰. *Ibid.*, hlm. 28.

Pengukuhan formalnya, dari semula telah direkayasa berbentuk Penpres (peraturan presiden) atau Inpres (instruksi presiden). Nyatanya, rekayasa itu terkabul. Bentuknya berupa Inpres No.1 tahun 1991, tanggal 10 juni 1991. sedangkan pernyataan berlakunya, dikukuhkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, tanggal 22 juli 1991. dengan demikian sejak tanggal 22 juli 1991, kitab KHI resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf, dan warisan.⁴¹

3. Pendekatan Perumusan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pendekatan perumusan KHI bisa juga disebut metode yang dilakukan dalam penyusunan perumusan terlebih dulu ditentukan metode berpikir, analisa, dan pengkajian sebagai patokan, dengan adanya pembatasan patokan pendekatan berpikir dalam merumuskan substansi materi pasal-pasal dan perumusan kompilasi tidak boleh melampoi pegangan yang ditetapkan.

Patokan pendekatan yang ditetapkan, dicari dari berbagai sumber dan pendapat yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan pandangan dan pemikirannya serta diuji pula kebenarannya dengan realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum Islam dari masa kemasa.⁴²

a. Sumber utama al Qur'an dan al Sunnah.

Pendekatan yang menitik sentralkan kepada nash Al-qur'an sejak semula penyusunan perumusan melepaskan diri dari ikatan

⁴¹. *Ibid.*, hlm. 29.

⁴². *Ibid.*, hlm. 30.

pendapat berbagai mazhab yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih. Meskipun demikian, diperlukan langkah-langkah yang luwes yakni:

1). Al-Qur'an dan sunnah bukan kitab hukum.

Seperti yang disinggung Fazlur Rahman, bahwa Al-qur'an sebuah buku prinsip-prinsip dan seruan moral, bukanlah sebuah dokumen hukum.⁴³ Meskipun didalamnya terdapat rumusan hukum, namun hukum yang dirumuskan baru setengah jadi atau bersifat "*quasi-law*". Sehingga dalam perumusan KHI tidak begitu saja mengambil dan mengangkat suatu nash sebagai rumusan yang sudah jadi, tetapi diolah kearah perumusan yang lebih matang, sehingga dapat diwujudkan perumusan hukum yang lebih matang atau "*maturity law*" yang berdimensi rasional,praktis dan aktual, sehingga berdaya guna dan mudah dicerna oleh masyarakat Islam.⁴⁴

2). Pendekatan eksperimental al Qur'an dan al Sunnah dijadikan dasar pembenaran perumusan tekstual secara kontekstual.

Fakta sejarah telah menunjukan secara terang, bahwa turunnya ayat-ayat Al-qur'an adalah secara "*eksperimental*". Diturunkan ayat demi ayat. Turunnya juga selalu berkaitan langsung dengan satu permasalahan yang timbul. Artinya turunya ayat selalu berisi jawaban atau keadaan dan situasi tertentu.

⁴³. Fazlur Rahman, *Islam*, bandung: Pustaka, 1984. hlm. 43.

⁴⁴. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 30-31.

Pendekatan eksperimental itu, juga terjadi pada kelahiran suatu hadist atau sunnah.⁴⁵

Tetapi menurut hemat penulis, tidak semua ayat ada *asbabun nuzulnya*. Atas dasar fakta pendekatan eksperimental yang membarengi kelahiran hukum-hukum yang ada dalam Al-qur'an dan sunnah, memberi pegangan kebolehan bagi kita untuk merumuskan KHI secara kontekstual berdasar tekstual. Disamping itu Al-qur'an sebagai wahyu yang berisi kehendak Allah, pada hakekatnya hanya mengandung prinsip-prinsip umum dan global secara luas, yang memberi kemungkinan, memberi penafsiran yang beraneka, memberi kelenturan yang lebih luas dan longgar sehingga diberi kekuasaan untuk mengatur bentuk pelaksanaan sesuai dengan keadaan setiap waktu dan tempat.⁴⁶

3). Syari'at ibarat spiral dalam batasan *qath'i*.

Artinya, terikat oleh batasan-batasannya tetapi bergerak sejalan dengan waktu, dengan normannya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum muslimin dari setiap zaman.

Dalam perumusan KHI, hipotesis sep spiral syari'at Islam dipedomani dalam acuan bahwa sepanjang nash yang bersifat *qat'i*.⁴⁷ Terbatas kemungkinan untuk melenturkan atau menafsirkan.

⁴⁵. *Ibid.*, hlm. 31

⁴⁶. *Ibid.*, hlm. 31-32.

⁴⁷ Qat'I (*qat'Iyud dalalah*) adalah nash yang mewujudkan kepada arti yang terang sekali untuk dipahamkan, hingga nash itu tidak dapat *ditakwilkan* dan dipahami dengan arti yang lain. Lihat . Muhtar Yahya, dan Fazlur Rahman, *dasar-dasar pembinaan hokum fiqih Islam*, Bandung: PT. Al-ma'arif, cet. Ke-1., 1986, hlm. 37

Sedangkan nash yang bersifat *zhanny* terbuka kemungkinan untuk menafsirkan dan melenturkan.⁴⁸

4). Merumuskan sesuatu yang baru yang tidak terdapat dalam nash.

Syari'ah seperlunya membuka pintu untuk menerima hal-hal baru apabila tidak ditemukan nashnya dalam Al-qur'an dan sunnah. Dalam keadaan yang seperti ini, syari'at dapat dikembangkan secara selektif dan hati-hati, untuk menerima bentuk-bentuk baru sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat.⁴⁹

b. Mengutamakan Pemecahan Problema Masa kini.

Selama sejarah manusia masih berlangsung tidak mungkin di capai pemecahan problem kehidupan secara tuntas. Pada hakekatnya, yang dapat di lakukan ialah mencoba memecahkan masalah. Pendekatan yang di pegang dalam perumusan KHI yakni mengutamakan pemecahan problem masa kini, yang di kejar ialah ketentuan dan ketetapan kehendak yang mampu mengatur dan memperbaiki tatanan serta ketertiban kehidupan masyarakat Islam.

Sehubungan dengan pegangan pendekatan ini, perumusan kompilasi barangkali sangat terkesan dengan teguran yang di sindirkan oleh Prof. Dr. Ismail R. Al. Faruqi, menurut beliau selama ini umat Islam telah mendalami studi dan perbandingan fiqh, tanpa pemahaman untuk pengembangan dan pemecahan problem masa kini.

Disamping perumusan KHI mengambil dari sumber al Qur'an dan Sunnah, yang menjadikan doktrin kitab-kitab fiqh sebagai bahan orientasi, memang sejak semula sudah di tetapkan patokan pendekatan, menjauhkan diri dari pengkajian perbandingan fiqh yang berlarut-larut, mengutamakan sikap memilih alternative yang lebih rasional, praktis dan aktual yang mempunyai potensi ketertiban dan kemaslakhatan umum yang luas serta lebih aman dalam persamaan.⁵⁰

Dengan cara pendekatan ini, pelaksanaan perumusan KHI tidak terjerumus pada perdebatan mempersoalkan *qala yaqulu* ,

⁴⁸. Zhany (*zhanniyaddalalah*) yaitu nash yang menunjukan kepada arti yang masih dapat dita'wilkan atau dialihkan kepada arti yang lain. *Ibid.*, hlm. 38.

⁴⁹. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 32.

⁵⁰. *Ibid.*, hlm. 33.

tetapi langsung di arahkan kepada masalah yang di hadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru di cari dan di pilh pendapat yang paling potensial memecahkan problem ketidak tertiban yang di hadapi selama ini.maka di rumuskanlah berbagai ketentuann yang memberi kepastian pemecahan keadaan ketidak tertiban kearah ketertiban kehidupan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan.⁵¹

c. Unity and Variety.

Yakni , satu dalam keragaman, dalam hal yang menyangkut fondasi akhidah dan keimanan, dunia Islam adalah *unity* (satu). Akan tetapi dalam hal yang menyangkut penerapan hukum dibidang *huququl ibad* (muamalah), Islam itu mempunyai corak yang beragam.

Kehadiran KHI lebih bersifat dinamika Islam pada umumnya, Islam Indonesia pada khususnya. Tidak salah Islam Indonesia memiliki hukum sendiri dan berkembang di Indonesia. Namun suatu hal yang pasti, kehadiran kompilasi sebagai fiqih Indonesia tidak pernah mengurangi dan melenyapkan sifat-sifat keabadian dan keunifersalan nilai-nilai normatifnya.⁵²

Sehingga kehadiran KHI tidak pantas jika dituduh membelah kesatuan umat Islam, juga tidak layak dituduh sebagai alat penelyapan paham ajaran mazhab. Akan tetapi yang ditentang oleh kehadiran fiqih-fiqih mazhab sebagai nilai-nilai hukum standard.⁵³

d. Pendektan kompromi dengan hukum adat.

Pendekatan ini adalah utamanya untuk mengantipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam Al-

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 34.

⁵³ *Ibid.*., hlm. 35.

qur'an. Pada segi lain nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan sebagai kebiasaan masyarakat Indonesia. Disamping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa kemaslahatan, ketertiban serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Pendekatan kompromistis dengan hukum adat tidak hanya terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan sebagai ketentuan hukum Islam, tapi juga dengan memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum adat.

Tujuannya agar ketentuan hukum Islam itu lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Dan yang penting untuk diperhatikan dalam pendekatan kompromistis antara hukum Islam dengan hukum adat adalah hukum yang lahir dari perpaduan kompromistis itu berubah dalam kerangka *maslakhah mursalah*.⁵⁵

Dalam kompilasi misalnya dapat ditemukan pengadaptasian nilai hukum yang terdapat dalam KUH Perdata seperti yang diatur dalam pasal 195 KHI yang memberi hak untuk menuntut perletakan sita marital atas harta bersama diluar gugat perceraian, tujuannya agar tetap terjamin keutuhan harta bersama.⁵⁶

B. Ketentuan Rujuk Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).

⁵⁴. *Ibid.*, hlm. 35.

⁵⁵. *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁶. *Ibid.*, hlm. 36-37.

Permasalahan rujuk didalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam bab XVIII pasal 163-169. disamping itu, istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa bab yang lain, yaitu bab II pasal 10 bab XVI pasal 118 dan XVII pasal 150.

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI pasal 167 ayat 2, “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Bahkan dalam hal mengatur persolaan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.⁵⁷ Hal ini diatur dalam pasal 164 dan 165 KHI yang berbunyi:

Pasal 164: “Seorang wanita dalam *iddah talaq raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.”

Pasal 165: “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”⁵⁸

Sedangkan proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh isterinya ada dalam dua bentuk yaitu:

1. penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri tersebut telah berlaku. Tetapi jika istri menolak rujuk suami tidak menerima penolakan itu, maka perkara itu baru dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.
2. penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk sampai ke Tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya dihadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan mantan istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang ada dilingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan

⁵⁷. Menara Tebuireng, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, dalam M. Chamim Supaat (eds.), *Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Jombang, Vol. 1 No. 1, tahun I, September 2004, hlm.35.

⁵⁸. Binbaga Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 71.

rujuk tersebut. Selanjutnya, untuk memutuskan perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk didalamnya sengketa penolakan rujuk yang diajukan oleh istri. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan istri dapat diterima atau ditolak.

Faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak dimana dalam peraturan Perundang-undangan yang mana KHI termasuk didalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin Pengadilan yang memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri.

Di samping itu, dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyariatkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.⁵⁹

Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk ini merupakan kawin kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan istri yang bersangkutan”. Bahwa melakukan rujuk itu tidak berbeda dengan melakukan nikah, artinya ada persetujuan mantan istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.⁶⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan istri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas

⁵⁹. Menara Tebuireng, *op. cit.*, hlm. 37.

⁶⁰. Instruksi Presiden R. I. No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal. 16 ayat 1, hlm. 29.

kehendak rujuk mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Dalam hal ini KHI tidaklah bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi dan selalu mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami istri, tidak hanya memandannng kemaslahatan mantan suami saja, tetapi juga kemaslahatan mantan istri.⁶¹

⁶¹. Menara Tebuireng, *op. cit.*, hlm. 38.

BAB V

ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK SUAMI DENGAN KHI PASAL 164 TENTANG KEWENANGAN ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Terhadap pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Keharusan Isteri Menerima Rujuk Suami dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Isteri Menolak Rujuk Suami.

1. Persamaan antara pendapat Imam al-Syafi'i dengan KHI

Menurut Imam al-Syafi'i rujuk itu harus dengan pernyataan yaitu dengan pernyataan rujuk yang dilakukan oleh laki-laki kepada mantan isterinya, apabila rujuk dilakukan tanpa ucapan atau bahkan dengan perbuatan maka rujuknya tidak sah. kemudian dalam KHI pasal 167 ayat (4) “setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk”.¹

Dengan terjadinya *talaq raj'i* maka kekuasaan bekas suami terhadap bekas isterinya menjadi berkurang namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama isteri dalam masa iddah yaitu memberikan *mut'ah*, seperti kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah seperti yang di firmankan Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat: 241.

¹ Instruksi Presiden R.I. Nomer. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal. 167 Ayat (4), hlm. 72.

"وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah di berikan oleh suaminya mut'ah) menurut yang ma'ruf sebagai suatu yang kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Qs. Al Baqarah: 241).²

Sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk merujuk bekas isteri dalam arti mengembalikannya kepada kedudukannya sebagai isteri secara penuh dan dengan persyaratan rujuk itu menjadi halal bekas suami mencampuri bekas isterinya, sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali sedia kala. Tentang hak merujuk dalam Al qur'an surat Al Baqarah ayat: 228, Allah berfirman.

"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا"

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki Islah".(Qs. Al Baqarah: 228).³

Kemudian di dalam KHI pasal 149 item a. Bila mana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami ''memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*'' dan pasal 152 ''bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyus*.'' ⁴

Pada hakekatnya rujuk itu merupakan kawin kembali dengan seorang wanita, dalam pelaksanaannya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami

² Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Cv Karya Utama, 2000, hlm. 55.

³*Ibid*

⁴ Instruksi Presiden, *op. cit.*, hlm. 66.

isteri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI
”Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”⁵ maka begitu
juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami
dan isteri yang bersangkutan.

Menurut Imam al-Syafi’i, bila seorang laki-laki mentalaq
isterinya di mana laki-laki itu memiliki rujuk, kemudian suami meninggal
sebelum iddahnya selesai, maka wanita itu beriddah wafat yaitu empat
bulan sepuluh hari⁶

kemudian dalam KHI pasal 153 ayat (2) huruf a. ”apabila
perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla al dhuhul* , waktu
tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari) dan pasal 154 KHI ”
apabila isteri tertalaq raj’i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (2) hurup b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153,
ditinggal suami oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat
bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.”⁷

Menurut Imam Al-Syafi’i bahwa kehadiran saksi dalam rujuk
adalah wajib, alasannya adalah bahwa tujuan rujuk sama dengan tujuan
nikah yaitu menghalalkan hubungan seksual maka seperti halnya dengan
nikah, wajib menghadirkan saksi,⁸ meskipun demikian pendapat Imam Al-
Syafi’i cukup realistis, karena kehidupan masyarakat sekarang ini di mana
norma-norma etika kian longgar. Agar kehidupan rumah tangga tenang

⁵ *Ibid.* hlm. 19.

⁶ Imam Al-Syafi’i, *Al Umm*, juz.5, Dar Al Fikr, tt., hlm. 257. lihat juga di *Al Umm* (terj)
Ismail Yakub (ed.el), jilid. VIII, Jakarta: C.V Faizan, cet.1., 1984. hlm. 423.

⁷ Instruksi Presiden, *op. cit.*, hlm. 67-68.

⁸ Imam Ibn Idris al-Syafi’i, *op. cit.* Juz. V, hlm.261.

maka rujuk harus di saksikan. Sebagai bagian upaya mengumumkan bahwa di antara mereka telah rujuk kembali.⁹

Masalah pentingnya saksi dalam hal rujuk didasarkan kepada petunjuk umum dalam firman Allah surat al Talaq ayat 2.

"فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا
ذَوِی عَدْلٍ مِّنْکُمْ"

Artinya: *Apabila mereka sudah mendekati akhir masa iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. (Qs. Al Talaq: 2).*¹⁰

Melakukan rujuk tidak berbeda dengan akad nikah artinya isteri yang akan dirujuk menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi , KHI pasal 164 menegaskan bahwa ”seorang wanita dalam iddah *talaq raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di saksikan dua orang saksi.

2. Perbedaan Pendapat Antara Imam al-Syafi'i dengan KHI

Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam masa iddah *talaq raj'i*, tidak di syaratkan adanya ridha dari isteri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut.¹¹

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan isterinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 6., 2003, hlm. 322.

¹⁰ Depa Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit. hlm.945

¹¹ Badrun, *Al Fiqh Al Muqaranu lilakhwal Al syahsiyyah*, juz.1, Dar nah dhatul Al Arabiyyah, tt., hlm. 366.

dari mantan isterinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI pasal 167 ayat(2) ” rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah ”¹²

Bahkan dalam hal pengaturan persoalan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan isterinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak oleh mantan isteri itu dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama hal ini diatur dalam KHI pasal 164 ”bahwa seorang wanita dalam iddah *talaq raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi” dan pasal 165 ”bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri , dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.¹³

Di samping itu, dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari isteri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyari’atkan Islam, salah satunya dengan rujuk, karena dengan adanya kerelaan dari isteri maka hal tersebut akan terwujud, jika tidak

¹² Instruksi Presiden, *Op. cit.* hlm. 72

¹³ *Ibid.* hlm.71.

rujuk akan berakibat sia-sia saja untuk itulah KHI memandang persetujuan isteri dalam hal rujuk itu di perlukan.

Kemudian apabila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami isteri yang seimbang dalam rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus didasarkan atas suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan, hal ini dapat di pahami dari pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI pasal 79 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 79

- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴

Dari sisi lain, KHI pasal 164 dan 165 menegaskan bahwa mantan isteri berhak melakukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, kemudian Pengadilan Agama dapat menyatakan tidak sah dengan keputusannya, kata-kata "bisa" yang tercantum dalam KHI tersebut dapat diambil pengertian bisa membatalkan atau tidak, hal ini dapat ditafsirkan kata "bisa" pada pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pembatalan Perkawinan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan isteri tidak selalu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 41.

tidak sah, terlebih dahulu memilih keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Dalam KHI pasal (167, 168 dan 169) dijelaskan tentang tata cara rujuk sementara Imam al-Syafi'i tidak menjelaskannya, hanya menjelaskan tentang menghadirkan saksi dalam merujuk isterinya.

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya kepegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talaq dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakhahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talaq raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap dua, di isi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari sesudah rujuk dilakukan.

- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilang.
Pasal 169
- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuatkan surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talaq yang bersangkutan dan kepada suami dan isteri masing-masing di berikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang di tetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang kepengadilan Agama di tempat berlangsungnya talaq dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang di maksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk di ikrarkan, nomer dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan Panitera.¹⁵

B. Analisis Istibat Hukum Imam Al-Syafi'i Tentang Keharusan Isteri Menerima Rujuk Suami dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Isteri Menolak Rujuk Suami

Sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam massa iddah talaq *raj'i*, tidak disyaratkan adanya ridha dari isteri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut. Ini adalah hak yang ditetapkan syara' bagi suami maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalaq dengan talaq *raj'i*: seorang laki-laki berkata:” saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu”, maka hak rujuknya tetap tidak akan

¹⁵ Instruksi Presiden, *ibid.* hlm.72-74.

gugur karena yang demikian itu merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah SWT¹⁶ dalam firmanya.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talaq yang dapat dirujuk dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (Qs. Al baqarah: 229)¹⁷

Dan tidak ada seorangpun yang dapat merubah ketentuan atau ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah SWT.

Dan firman Allah yang lain dalam Al qur'an surat Al Baqarah:228

"وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا "

Artinya: “wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah”. (Qs. Al baqarah: 228).

Imam al-Syafi'i berkata tentang firman Allah “inaraaduu islakha” (jika mereka itu menghendaki perdamaian), ia berkata *islakh* talaq (perdamaian dalam talaq) itu adalah rujuk. Maka barang siapa yang menginginkan rujuk maka perempuan itu adalah bagi laki-laki. suami merdeka maupun yang mentalaq isterinya satu kali atau dua kali talaq sesudah ia mensetubuhinya maka laki-laki itu lebih berhak merujukinya selama wanita

¹⁶ Badrun. *Al Fiqhu Al Muqaren li Ahwal Al Syahsiyah*, Dar Al Nahidhatul Arabi'ah, tt. Juz.1., hlm336.

¹⁷ Depag R.I. *Al qur'an dan Terjemahannya*, op. ciit. Hlm.55.

itu belum habis iddahnya berdasarkan dari dalil kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, sebagai berikut.

"فإن ركانة طلق امراته البتة ولم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله تعالى أعلم."

Artinya: "sesungguhnya rukanah mentalaq istinya secara bain dan ia tidak menginginkan kecuali satu talaq maka Rasulullah mengembalikan isterinya itu kepadanya dan itu menurut kami adalah didalam iddah".¹⁸

Talaq hamba itu dua kali, bila ia mentalaq satu maka hamba itu seperti orang merdeka yang mentalaq isteri merdeka satu kali talaq atau dua kali talaq, dan ia memiliki rujuknya sesudah satu kali talaq sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki mereka yang kafir baik dzimmi ataupun bukan, dzimmi dalam talaq dan rujuk adalah sama seperti laki-laki muslim yang merdeka, bila telah selesai iddah maka tidak ada jalan bagi suami atas isterinya kecuali dengan pernikahan baru, karena Allah Azza wajalla ketika menjadikan rujuk atas wanita sesudah selesai iddah. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat: 234. sebagai berikut.

"فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

Artinya: "kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut". (Qs. Al baqarah: 23)¹⁹

Dari hal ini dapat dilihat bahwa pada masalah hak suami merujuk isterinya, Imam Al-syafi'i menggunakan dasar hukum yang berasal dari Al qur'an, Al sunnah dan ijma'.

¹⁸ Muhammad Idris Al Syafi'i. *Al Umm*, Jilid VIII, terj. Ismail Ya'kub. (ed.el). Jakarta: Cv Faizan, cet.1.,1984. hlm. 423. lihat juga di *Al Umm*, Juz V, hlm. 260.

¹⁹ Departemen R.I. *Al qur'an dan Terjemahannya*, op. cit. hlm. 57.

C. Pendapat yang Lebih Rajih (yang terkuat) Antara Pendapat Imam Al-Syafi'i dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Syariat Islam membolehkan perceraian atau *talaq* dari suatu perkawinan apabila suasana hidup rukun dan damai sudah bertukar dengan kegaduhan dan permusuhan yang tidak dapat di atasi lagi meskipun orang ketiga (hakam) sudah ikut campur, kalau sudah dalam keadaan demikian gentingnya masih tidak terbuka dan alangkah tersiksanya lahir batin kedua belah pihak, tentulah masing-masing akan mencari ketenangan jiwa di luar rumah dan masing-masing melepaskan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan keluarga, akibatnya akan menimpa anak-anak seluruh keluarga.

Pada hakekatnya rujuk itu merupakan kawin kembali dengan seorang mantan isteri, dalam pelaksanaanya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri, sebagaimana yang ditegaskan dalam KHI pasal 16 ayat (1) ”Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” maka begitu juga dengan hal rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan isteri yang bersangkutan.

Dalam hal perkawinan seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan isterinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan mantan isterinya tersebut, hal ini di atur dalam KHI pasal 167 ayat (2) ”Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah”

Dalam hal mengatur tentang rujuk, KHI lebih tegas lagi yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan

isterinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang dilakukan oleh suaminya itu dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama hal ini di atur dalam KHI pasal 164 dan pasal 165 ''Seorang wanita dalam iddah *talaq raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi'', ''bahwa rujuk yang di lakukan tanpa persetujuan bekas isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama''.

Di dalam al Qur'an dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang akan merujuk isterinya tidak boleh dengan jalan paksa Allah berfirman dalam al Qur'an surat Annisa ayat 19 sebagai berikut:

وَلَا تُنْكِرُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: ''janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka''. (Qs. Al Baqarah: 231).²⁰

Disamping itu dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari isteri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai, dengan demikian upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang di syari'atkan Islam salah satunya dengan rujuk, karena dengan adanya kerelaan dari isteri maka hal tersebut akan terwujud, jika tidak, rujuk akan berakibat sia- sia saja, untuk itulah KHI memandang persetujuan isteri dalam hal rujuk itu di perlukan.

²⁰ Departemen Agama R.I., *Al qur'an dan Terjemahannya*, op. cit. hlm. 56..

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas panjang lebar mengenai hak rujuk dalam nikah, khususnya status komparasi pendapat Imam al-syafi'i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami, maka untuk mengakhiri pembahasan-pembahasan dalam karya ilmiah ini, setelah menganalisa dan mencermati uraian-uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, maka perlu kiranya mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut.

1. Menurut Imam al-syafi'i bahwa rujuk adalah hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah talaq raj'i, tidak disyaratkan adanya ridha dari isteri maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut.

Istinbath hukum yang dipakai Imam al-syafi'i tentang hak rujuk bagi suami terhadap isterinya adalah al-Quran surat al Baqarah ayat 228 dan 229, dan hadist Nabi tentang talaq bain yang dijatuhkan oleh beliau kepada Rukanah yang menginginkan satu talaq, dan hadist Nabi tentang peristiwa talaq yang dilakukan beliau kepada isterinya Khafsah.

2. Menurut KHI pasal 164 bahwa seorang wanita dalam iddah talaq raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan

suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi, kemudian pasal 165 bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Secara literal dalam al-Qur'an pada surat al Baqarah ayat 228 dan ayat: 231, sebenarnya mantan isteri juga mempunyai hak menolak rujuk tetapi yang lebih berhak adalah mantan suami.

Kemudian apabila di kaitkan dengan hak dan kedudukan suami isteri yang seimbang dalam rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus di dasarkan atas suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan, hal ini dapat di pahami dari pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI pasal 79 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 79

- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
 - (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Di dalam al Qur'an dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang akan merujuk isterinya tidak boleh dengan jalan paksa Allah berfirman dalam al Qur'an surat Annisa ayat 19 sebagai berikut:

"وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا"

Artinya: ''janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka''. (Qs. Al Baqarah: 23).¹

Disamping itu dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari isteri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai, dengan demikian upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang di syari'atkan Islam salah satunya dengan rujuk, karena dengan adanya kerelaan dari isteri maka hal tersebut akan terwujud, jika tidak, rujuk akan berakibat sia- sia saja, untuk itulah KHI memandang persetujuan isteri dalam hal rujuk itu di perlukan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mempunyai saran yang konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi kaum muslimin secara umum, sangat dianjurkan untuk mengikuti mazhab (*taqlid*) dalam memahami dan menjalankan ajaran Agamanya. Namun dalam mengikuti atau *bertaqlid* tidak diperkenankan *bertaqlid* buta yang akan membawa fanatisme sempit dan menyebabkan disintegrasi intern kaum muslimin.
2. Bagi kalangan terpelajar, dalam bermazhab dianjurkan tidak hanya mengambil secara tekstualis saja, namun dituntut paling tidak

¹ Departemen Agama R.I., *Al qur'an dan Terjemahannya*, op. cit. hlm. 56..

mengetahui asal usul atau metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam mazhab dalam menetapkan suatu hukum atau yang sering disebut dengan bermazhab secara *manhaji*.

3. Bagi kalangan yang berminat untuk meneliti dan mengembangkan lebih jauh tentang hukum Islam, sebaiknya tidak melupakan hasil formulasi atau kodifikasi dari para Imam mazhab atau Imam-Imam yang lain yang digunakan sebagai acuan dan perbandingan dalam meneliti dan mengembangkan hukum Islam selanjutnya.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan karunia serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu berdo'a dan memohon ketabahan dan bimbingan dari Allah SWT, dengan harapan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan bagi penulis sendiri. Sebagai manusia kekurangan pastilah ada, akhirnya atas segala kekurangan itu memang keterbatasan kami dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, saran dan kritik yang membangun sangat penulis butuhkan dan semoga menjadi karya yang bermanfaat serta senantiasa diridhai Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syafi'i, Muhammad Idris, *Al-Umm*, Juz.I,V,VII,VIII, Beirut. Dar al-Fikr tt.
- , *Al-Risalah*. Beriut: Dar al-Fikr, tt,
- , *Al-Umm* (terj) Ismail Yakub (et.el), jilid. VIII, Jakarta: CV. Faizan, cet.1., 1984.
- Abdilah, Pius, dan. Anwar Syarifudin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt,
- Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar*, juz.V, Dar al-Kutub al-Alamiyyah, tt.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh (terj) HM. H. Al Hamid Al Husaini*, Pustaka Hidayah,
- Al-Syurbasi, Ahmad, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, (Terj): Sabil Huda dan H. A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. Ke-1, 1991,
- Al-Siddiqi, TM Hasbi *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Jilid ke-2., 1973.
- Al Jundi, Abdul Halim, Syafi'i Nashir *al-Sunah Wa Wadhi' al-Ushul* Beirut: Dar al-Fikr, tt..
- Al Nawawi, *jarrah Wata'dil*. al-Nawawi, *Tahzib al-Asma' Wa al-Luqah*, juz. III, *Mesir, Al-Muhiriyah*, tt.,
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, cet-1., 1992.
- Abbas, Sirajudin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Ali Hasan, Muhammad, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV, 2002.
- Alfatih Suryadilaga, Muhammad, (ed), *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Badrun, *al-Fiqh al-Muqaranu li al-Akhwal al-Syahsiyyah*, juz.1, Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, tt..

- Barkatullah, Abdul Halim & Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I., 2006,
- Departemen Agama, *Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN, cet. Ke-2, 1984.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1988, Cet. Ke-1.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-3., Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Departemen Agama.RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.
- Esck, Uya Farid, *Membebaskan yang Tertindas : Al-Qur'an. Liberalisme, Pluralisme*, Bandung : Mizan Media Utama, 2002.
- Harahap, Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-2., 2003.
- Instruksi Presiden R. I. No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal. 16 ayat 1.
- I.Doi., Abdurahman, *The Islamic Law*. Terj. Panji Mas “*Inilah Syari'ah Islam*”, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, cet.I, 1990,
- Jawad Muqniyyah, Muhammad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tej) Masykur (ed.el) *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, cet. 6., 2007.
- Kanisius, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, cet. V., 1999,
- Mubarok, Jaih *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-1
- Musthafa, al-Maraghi, Abdullah, *Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyin*, terj. Husein Muhammad, “ *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*”, Yogyakarta: LKPSM, cet-1, 2001.
- Morgan, K. *Islam Jalan Lurus*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980,

- Menara Tebuireng, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, dalam M. Chamim Supaat (ed.el), *Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Jombang, Vol. 1 No. 1, tahun I, September 2004,
- Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, , cet. Ke-12001.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Thoha Putra, cet.I, 1993.
- Nasution, Harun, (ed. el), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.6, 2003.
- Rasid, Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqih lengkap)*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, cet.27, 1994.
- Rahman, . Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Subagyo, P. Joko *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Sibawaih, *Hermeneutika Al Qur'an Fazlur Rahman*, Bandung: Jalasutra, cet.I,2007,
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002.
- Sulaiman, Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Imam al-Syafi'i*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, cet. I., 1996,.
- Sihbudi, Riza, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, cet-2., 1993,
- .
Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet-1, 1997,
- UU No I tahun 1974, tentang Perkawinan pasal.I.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)* Jakarta: Radar Jaya, cet-2., 2002.
- .
Yahya, Muhtar, dan Fazlur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-ma'arif, cet. Ke-1., 1986.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, tt.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Purwanto
NIM : 2102036
Tempat/Tanggal lahir : Grobogan, 24 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Lengkong Rt. 01, Rw. 02, Ds. Sembungharjo, Kec.
Pulokulon, Kab. Grobogan
Alamat Kost : Jl. Segaran IV Gang 41, Rt. 04, Rw. 9, Tambak Aji
Ngalian Semarang.
Pendidikan :
✎ SDN Sembungharjo lulus tahun 1994
✎ MTs Miftahul Huda Panunggalan lulus tahun 1997
✎ MAN Purwodadi lulus tahun 2000
✎ Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan
2002/2003

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 21 Juli 2008

Hormat saya,

Purwanto